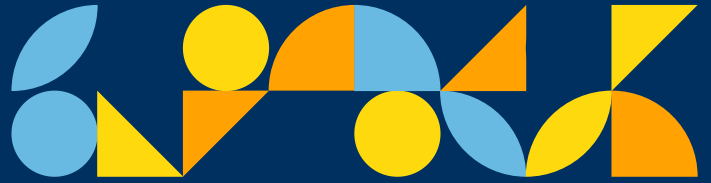


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan/pemberi amanah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran program yang ditetapkan dalam dokumen Renstra BPKP Tahun 2020 - 2024 maupun Perkin Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi BPKP.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 dilakukan pengumpulan data kinerja dengan melibatkan seluruh bidang-bidang pengawasan dan bagian umum di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur. Pengumpulan data kinerja dilakukan dengan tujuan memperoleh data kinerja yang akurat, lengkap, konsisten, dan berguna bagi pengambilan Keputusan dalam upaya perbaikan kinerja periode selanjutnya.

Pengukuran data kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target yang tercantum pada dokumen Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023. Rumus yang digunakan untuk menghitung presentase pencapaian target indikator kinerja terdiri atas:

1. Rumus untuk IKK yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan.

$$\text{Presentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{rencana}}{\text{realisasi}} \times 100\%$$

2. Rumus untuk IKK yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih kecil dari nilai target yang ditetapkan. (mis: Jumlah BUMD dengan Kinerja Sehat/ Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3)

$$\text{Presentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{rencana} - (\text{realisasi} - \text{rencana})}{\text{realisasi}} \times 100\%$$



Uraian yang disampaikan dalam pengukuran kinerja untuk setiap indikator kinerja memuat penjelasan mengenai:

1. Target dan realisasi setiap indikator kinerja program (IKP) untuk kedeputan, indikator kinerja kegiatan (IKK) untuk Direktorat, Perwakilan BPKP, Biro, Pusat dan Inspektorat;
2. Analisis perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi tahun 2020, 2021, dan 2022; target akhir tahun renstra (2024);
3. Aktivitas pengawasan Agenda Prioritas Pengawasan (APP) dan/atau pengawasan lain yang dilakukan untuk mendukung ketercapaian setiap sasaran program dan kegiatan;
4. Faktor pendukung ketercapaian kinerja, kendala dan rencana tindaknya.

B. Capaian Kinerja Tahun 2023

1. Ringkasan Capaian Kinerja

Hasil pengukuran kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur atas sasaran strategis yang dijabarkan dalam 6 sasaran kegiatan dan 36 indikator kinerja, menunjukkan bahwa 33 indikator kinerja telah mencapai target dan 3 indikator kinerja belum mencapai target. Ringkasan capaian kinerja masing-masing indikator kinerja pada setiap sasaran strategis sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Ringkasan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

No	Sasprog/Saskeg/IKU	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
I	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah					
1.1	Nilai Optimalisasi Penerimaan Daerah yang Terealisasi	Rp (Juta)	2.412	16.200	671,71%	●
1.2	Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah	Rp (Juta)	176.687	8.097.140	4582,76%	●
1.3	Nilai Penyelamatan Keuangan Negara dan Daerah	Rp (Juta)	42.597	71.756	168,45%	●
Capaian Rata-rata					1807,64%	
II	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional					
2.1	Jumlah Proyek Strategis Nasional yang Tercapai Sesuai Target	PSN	1	8	800,00%	●
2.2	Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	(%) Persen	85	100	117,65%	●
2.3	Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang Diawasi	Kegiatan Prioritas Daerah	2	2	100,00%	●
2.4	Persentase rekomendasi strategis yang ditindaklanjuti	(%) Persen	80,00	88,89%	111,11%	●
Capaian Rata-rata					282,19%	
III	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha					
3.1	Jumlah BUMD dengan Pengelolaan Korporasinya Baik	BUMD	2	2	100,00%	●
3.2	Jumlah BUMD dengan Kinerja Sehat	BUMD	10	11	110,00%	●
3.3	Jumlah BLUD dengan Kinerja Sehat	BLUD	2	3	150,00%	●
3.4	Jumlah BUMDes yang Mampu Menyusun Laporan	BUMDes	51	61	119,61%	●
3.5	Jumlah BUMDes yang memberikan kontribusi pada perekonomian desa	BUMDes	8	19	237,50%	●
Capaian Rata-rata					143,42%	



No	Sasprog/Saskeg/IKU	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
IV Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi						
4.1	Persentase Hasil Pengawasan Represif yang Dimanfaatkan/ Ditindaklanjuti	(%) Persen	100	100	100,00%	●
4.2	Persentase Hasil Pengawasan Preventif dan Edukatif yang Dimanfaatkan/Ditindaklanjuti	(%) Persen	85	100	117,65%	●
4.3	Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik	Pemda	3	2	66,67%	●
4.4	Jumlah Badan Usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik	Badan Usaha	1	1	100,00%	●
Capaian Rata-rata					96,08%	
V Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU						
5.1	Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	Provinsi	1	1	100,00%	●
5.2	Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	Kab/Kota	10	10	100,00%	●
5.3	Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	Provinsi	1	1	100,00%	●
5.4	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	Kab/Kota	10	8	80,00%	●
5.5	Jumlah Provinsi dengan MRI \geq Level 3	Provinsi	1	1	100,00%	●
5.6	Jumlah Kab/Kota dengan MRI \geq Level 3	Kab/Kota	5	6	120,00%	●
5.7	Jumlah Pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	Pemda	7	1	14,29%	●
5.8	Jumlah Desa yang pengelolaan keuangannya akuntabel	Desa	25	76	304,00%	●
5.9	Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai	Desa	25	30	120,00%	●
5.10	Jumlah BUMD dengan MRI \geq Level 3	BUMD	3	3	100,00%	●
5.11	Jumlah BLUD dengan MRI \geq Level 3	BLUD	4	6	150,00%	●
5.12	Jumlah BUMD dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3	BUMD	2	2	100,00%	●
5.13	Jumlah BLUD dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3	BLUD	1	1	100,00%	●
Capaian Rata-rata					114,48%	
VI Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja						
6.1	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor Skala 100	75	85,94	114,59%	●
6.2	Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor Skala 100	82	83,55	101,89%	●
6.3	Persentase Efektivitas Pengendalian Intern (SPIP Unit Kerja)	(%) Persen	70	100	142,86%	●
6.4	Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja)	(%) Persen	100	100	100,00%	●
6.5	Indeks Kualitas Layanan Eksternal Unit Kerja	Indeks Skala 100	75	91,22	121,63%	●
6.6	Skor IKPA Unit Kerja	Indeks Skala 100	95	99,99	105,25%	●
6.7	Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja	Indeks Skala 100	80	107,24	134,05%	●
Capaian Rata-rata					117,18%	
Total Capaian Rata-rata					426,83%	

Analisis perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 dengan realisasi tahun 2020, 2021, dan 2022 serta target akhir tahun renstra (2024) disajikan pada **Lampiran II**



2. Uraian Kinerja

Realisasi kinerja tahun 2023 berdasarkan sasaran program/sasaran kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur diuraikan di bawah ini:

Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah

Rata-rata capaian kinerja "Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah" tahun 2023 adalah 1807,64%. Capaian sasaran kegiatan ini diukur dengan menggunakan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu:

- 1) Nilai Optimalisasi Penerimaan Daerah yang Terealisasi
- 2) Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah
- 3) Nilai Penyelamatan Keuangan Negara dan Daerah

Capaian masing-masing indikator kinerja disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Target dan Realisasi Sasaran Kegiatan 1

No	Sasprog/Saskeg/IKU	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
I	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah					
1.1	Nilai Optimalisasi Penerimaan Daerah yang Terealisasi	Rp (Juta)	2.412	16.200	671,71%	●
1.2	Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah	Rp (Juta)	176.687	8.097.140	4582,76%	●
1.3	Nilai Penyelamatan Keuangan Negara dan Daerah	Rp (Juta)	42.597	71.756	168,45%	●
Capaian Rata-rata					1807,64%	

Uraian masing-masing indikator kinerja sasaran kegiatan "Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah" adalah sebagai berikut.

a. IKK 1.1 : Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi

Nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi berdasarkan hasil pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur sebesar
Rp16.199.996.605,00

Nilai optimalisasi penerimaan negara/daerah yang terealisasi dihitung berdasarkan hasil kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan BPKP. Penerimaan negara/daerah sesuai dengan rincian sumber penerimaan APBN/D, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, antara lain seperti pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Nilai Optimalisasi Penerimaan Negara/Daerah yang terealisasi berdasarkan hasil pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 yaitu sebesar Rp16.199.996.605,00 mencapai 671,71% dari target tahun 2023 sebesar Rp2.411.760.000,00. Angka capaian tersebut terdiri dari capaian bidang APD sebesar Rp4.480.462.365 dan bidang IPP sebesar Rp11.719.534.240,00 dan telah dilakukan *inputing* di SIMA.

Nilai Optimalisasi Penerimaan Daerah yang Terealisasi pada Tahun 2023 sebesar Rp16.199.996.605,00 menurun 91,25% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp185.235.850.342,00. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra 2024 sebesar Rp3.460.000.000. Nilai Optimalisasi Penerimaan Daerah yang Terealisasi mencapai 468,21%.



Nilai realisasi indikator kinerja di atas diperoleh atas hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bidang Pengawasan Akuntabilitas Pemerintah Daerah sesuai PKPT APP Sektor Akuntabilitas Keuangan Negara, Daerah dan Desa yaitu Optimalisasi PAD dan Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Sektor Non-Prioritas.

Aktivitas-aktivitas pengawasan penting yang mendukung pencapaian target "nilai optimalisasi penerimaan daerah yang terealisasi" antara lain sebagai berikut:

- a. Optimalisasi PAD, dengan rincian pada Tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.3 Rincian Nilai PAD yang Teroptimalisasi

No	Nama Penugasan	Pajak Restoran	Pajak Sarang Burung Walet	PBB	Pajak Reklame	Pajak Hotel	Pajak Penerangan Jalan	Total
1	Evaluasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Berau Tahun 2022 dan s.d April Tahun 2023	357.682.300	31.268.500		-	1.093.912.496	-	1.482.863.296
2	Evaluasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022 dan s.d April Tahun 2023	258.930.908	-		9.660.000	194.255.915	824.245.845	1.287.092.668
3	Pendampingan Audit Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023	907.736.058	-		-	242.117.346	-	1.149.853.404
4	Hasil Pemeriksaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur			560.652.997				
Total		1.524.349.266	31.268.500	560.652.997	9.660.000	1.530.285.757	824.245.845	4.480.462.365

- b. Kegiatan pengawasan oleh Bidang IPP yang menunjang IKK 1.1 tertera pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Rincian Kinerja Bidang Pengawasan IPP pada IKK 1.1

No	Nama Penugasan	Jumlah (Rupiah)
1	Pemeriksaan Laporan Auditor Independen Dukungan atas Laporan Keuangan Dam Operational Improvement and Safety Project II (DOISP II) IBRD Loan No. 8711-ID & AIB Loan No. 000010-IDN pada PIU Satker Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air IV Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV untuk Tahun Anggaran yang berakhir per 31 Desember 2022, senilai Rp55.985.440,00;	55.985.440
2	Audit Dukungan atas Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)/National Slum Upgrading Program (NSUP) Loan IBRD No 8636 dan AIB 0004-IDN pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022, senilai Rp1.096.441,00;	1.096.441
3	Hasil Pemeriksaan Pemenuhan Kewajiban PNBK CV Rinda Kaltim Anugerah Periode 1 Januari 2018 s.d. 31 Desember 2022, senilai Rp1.481.147.353,00 dan telah dilakukan tripatri;	1.481.147.353
4	Hasil Pemeriksaan Pemenuhan Kewajiban PNBK CV Cahaya Belawan Sejahtera Periode 1 Januari 2018 s.d. 31 Desember 2022, senilai Rp10.181.305.006,00 dan telah dilakukan tripatri;	10.181.305.006
	Total	11.719.534.240



Faktor Pendukung/Penghambat Pencapaian Kinerja

1. Auditor telah mengikuti diklat substantif yang kemudian disampaikan kepada tim melalui Program Pelatihan Mandiri (PPM) dalam peningkatan kompetensi SDM.
2. Bekerja sama dengan Badan Pendapatan Daerah melalui pendampingan audit optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rencana Tindak

1. Melanjutkan kerja sama yang baik dengan Badan Pendapatan Daerah dalam hal pengoptimalan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Mendorong percepatan tindak lanjut atas hasil rekomendasi pengawasan.

b. IKK 1.2 : Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah

Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah berdasarkan hasil pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur sebesar

Rp8.097.140.315.204,00

Nilai pengeluaran negara/ daerah yang efisien adalah nilai yang menunjukkan besarnya pengurangan/ pengalihan nilai pengeluaran yang direncanakan (belum direalisasi) yang tidak tepat, berdasarkan hasil pengawasan Perwakilan BPKP.

Yang dimaksud dengan perencanaan tidak tepat antara lain tidak berorientasi hasil, tidak jelas ukuran keberhasilannya, tidak memiliki dampak langsung terhadap pencapaian sasaran, dan proses bisnis kegiatan tidak selaras dengan sasaran.

Nilai pengeluaran negara/ daerah yang efisien diukur dengan menjumlahkan nilai pengurangan/ pengalihan rencana belanja proyek/ kegiatan/ program yang tidak tepat dalam satu tahun anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Nilai anggaran/rencana belanja yang berpotensi menjadi lebih efektif dan efisien dikarenakan:
 - a) dialihkan ke proyek/kegiatan/program yang lebih berdampak atau lebih hemat;
 - b) rincian atau metodologi kegiatan diperbaiki sehingga lebih berdampak atau lebih hemat;
 - c) ukuran/indikator keberhasilan diperbaiki sehingga lebih terukur dan berorientasi hasil.
- 2) Nilai rupiah yang dapat dihemat melalui hasil pengawasan BPKP yang bersifat non-investigatif seperti audit klaim/verifikasi tagihan, koreksi *cost-recovery*, audit penyesuaian harga, audit *cost-saving*, dan sebagainya.

Nilai efisiensi pengeluaran negara/ daerah berdasarkan hasil pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 yaitu sebesar Rp8.097.140.315.204,00 mencapai 4582,76% dari target tahun 2023 sebesar Rp176.687.090.000. Angka capaian tersebut terdiri dari capaian bidang APD sebesar Rp8.074.934.986.123,00 dan bidang Investigasi sebesar Rp22.205.329.081,00 dan telah dilakukan *inputing* di SIMA.



Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah pada Tahun 2023 sebesar sebesar Rp8.097.140.315.204,00 naik 1676,24% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp455.857.370.332,00. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra 2024 sebesar Rp112.930.000.000, realisasi Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah mencapai 7170,05%.

Nilai realisasi indikator kinerja di atas diperoleh atas hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bidang Pengawasan Akuntabilitas Pemerintah Daerah sesuai PKPT APP Sektor Akuntabilitas Keuangan Negara, Daerah dan Desa yaitu Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah dan Sektor Non-Prioritas Bidang Pengawasan Investigasi.

Aktivitas-aktivitas pengawasan penting yang mendukung pencapaian target "nilai pengeluaran negara/ daerah yang efisien" antara lain sebagai berikut:

- a. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah melalui Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah pada 5 sektor meliputi isu strategis yaitu pengentasan kemiskinan, penanganan stunting, pemberdayaan UMKM, daya saing pariwisata, dan ketahanan pangan pada seluruh pemerintah daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dengan hasil pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5 Rincian Nilai Hasil Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran pada Pemerintah Daerah Tahun 2023

No	Pemerintah Daerah	Jumlah Tidak Efektif + Tidak Efisien(Rupiah)
1	Provinsi Kalimantan Timur	Rp108.131.272.424
2	Provinsi Kalimantan Timur (Lanjutan)	Rp86.002.648.707
3	Kota Samarinda	Rp51.966.871.000
4	Kota Samarinda (Lanjutan)	Rp462.182.628.824
5	Kabupaten Kutai Kartanegara	Rp19.505.575.000
6	Kabupaten Kutai Kartanegara (Lanjutan)	Rp981.310.490.546
7	Kabupaten Kutai Timur	Rp218.930.235.993
8	Kabupaten Berau	Rp77.210.620.632
9	Kota Balikpapan	Rp1.511.976.712.885
10	Kabupaten Kutai Barat	Rp65.557.978.564
11	Kabupaten Mahakam Ulu	Rp801.205.336.167
12	Kota Bontang	Rp76.003.476.928
13	Kabupaten Penajam Paser Utara	Rp22.078.429.718
14	Kabupaten Paser	Rp3.592.872.708.735
Total		Rp8.074.934.986.123

- b. Audit atas Penyesuaian Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Aspal

Tabel 3.6 Rincian Nilai Hasil Audit Penyesuaian Harga

No	Nama Penugasan	Hasil Koreksi
1	Audit Penyesuaian Harga Akibat Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan/atau Aspal di Lingkungan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional	Rp7.550.101.139



No	Nama Penugasan	Hasil Koreksi
	Wilayah II Provinsi Kalimantan Timur Periode Maret 2022 s.d. Desember 2022	
2	Audit atas Penyesuaian Harga Akibat Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan/atau Aspal pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Timur di Lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur atas Paket Pekerjaan terlampir.	Rp10.412.814.440
3	Audit atas Penyesuaian Harga Akibat Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan/atau Aspal pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Perbatasan Provinsi Kalimantan Timur di Lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur	Rp3.457.494.305
4	Audit atas Penyesuaian Harga Akibat Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan/atau Aspal pada Satuan Kerja Pelaksanaan Pembangunan IKN I di Lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur	Rp784.919.197
Total		Rp22.205.329.081

Faktor Pendukung/Penghambat Pencapaian Kinerja

1. Koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah dalam hal perolehan informasi/data perencanaan.
2. Ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, dan waktu penugasan yang memadai dalam pelaksanaan pengawasan.
3. Penugasan Audit dilakukan secara cermat sehingga menghasilkan penghitungan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Tim Auditor berkoordinasi dengan Unit Penanggung Jawab atau Pelaksana Program/Kegiatan sehingga data yang diperoleh akurat untuk mendukung penghitungan.
5. Melaksanakan penugasan sesuai prosedur dan mendalami peraturan terkait kegiatan yang akan diaudit sehingga audit tercapai secara efektif dan efisien

Rencana Tindak

1. Meningkatkan Kompetensi Auditor untuk mendukung penugasan.
2. Memberikan sosialisasi kepada Auditor lain yang belum pernah melaksanakan Audit Klaim/Penyesuaian Harga agar Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur tidak kehilangan kemampuan SDM.
3. Menjalin kerja sama yang baik dengan pemerintah daerah se-Provinsi Kalimantan Timur serta mendorong percepatan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan

c. IKK 1.3 : Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah

Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah berdasarkan hasil pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur sebesar
Rp71.756.143.669,00

Nilai penyelamatan keuangan negara adalah nilai yang menunjukkan besarnya jumlah nilai temuan pengembalian ke kas negara atas belanja yang sudah direalisasikan dan atau pemulihan hak negara atas aset negara.

Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah diukur dengan menghitung nilai belanja yang dikembalikan ke kas negara termasuk denda yang dikenakan dari hasil pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur dan nilai aset yang dipulihkan.

Nilai penyelamatan keuangan negara berdasarkan hasil pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 yaitu sebesar



Rp71.756.143.669,00 mencapai mencapai 168,45% dari target tahun 2023 sebesar Rp42.597.070.000,00. Angka realisasi tersebut terdiri atas hasil pengawasan bidang APD senilai Rp157.329.934,00, bidang Investigasi senilai Rp70.888.171.788,00, dan bidang IPP senilai 710.641.947,00 atas nilai-nilai tersebut telah dilakukan *inputting* pada SIMA.

Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah pada Tahun 2023 sebesar Rp71.756.143.669,00 turun 9,07% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp78.916.084.245,93. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra 2024 sebesar Rp51.982.000.000,00 realisasi Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah mencapai 138,04%.

Nilai realisasi indikator kinerja di atas diperoleh atas hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bidang Pengawasan Akuntabilitas Pemerintah Daerah sesuai PKPT APP Sektor Akuntabilitas Keuangan Negara, Daerah dan Desa yaitu Efektivitas Transfer ke Daerah dan Sektor Non-Prioritas Bidang Pengawasan Investigasi dan Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat.

Aktivitas-aktivitas pengawasan penting yang mendukung pencapaian target "nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah" antara lain sebagai berikut:

- a. Pengendalian Kecurangan dan Hambatan Kelancaran Pembangunan

Tabel 3.7 Rincian Nilai Pengawasan Pengendalian
Kecurangan dan Hambatan Kelancaran Pembangunan

No	Nama Penugasan	Hasil Audit
1	Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Manuntung Kota Balikpapan TA. 2021	Rp5.307.230.000
2	Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pembangunan Masjid Darul Falah Kabupaten Kutai Kartanegara yang bersumber dari Dana Hibah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur TA 2017	Rp2.700.000.000
3	Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kegiatan Pembangunan Embung di Desa Bukit Pariaman Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara TA. 2020	Rp1.611.183.075
4	Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kutai Barat pada Perusahaan Daerah Witeltram Tahun Anggaran 2019-2020	Rp2.000.000.000
5	Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pengelolaan Dana Desa (DD), Anggaran Dan Kampung (ADK) dan Bantuan Keuangan di Kampung Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2019-2020	Rp978.445.124
6	Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Program Rehabilitasi Mangrove Tahun Anggaran 2021 di Wilayah Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dengan Pelaksana Kelompok Tani Labuangkallo Mandiri Kecamatan Tanjung Harapan	Rp741.566.000
7	Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembayaran Uang Ganti Rugi Perumahan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur	Rp4.983.821.814



No	Nama Penugasan	Hasil Audit
8	Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengusulan dan Realisasi Anggaran Hibah kepada KONI Kabupaten Berau TA. 2019 s.d. 2022	Rp1.176.129.796
9	Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Bantuan Seragam dan Perlengkapan Sekolah bagi Siswa Baru Jenjang TK/PAUD/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA dan SLB pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2020	Rp2.948.167.924
10	Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Pengadaan Sollar Cell Penerangan Lampu Halaman Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2020	Rp16.613.375.782
11	Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Kegiatan Padat Karya Percepatan Rehabilitasi Mangrove di Desa Sesulu Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara TA 2021 yang dilaksanakan oleh KUB. Setia Kawan	Rp1.068.214.250
12	Audit PKN Tindak Pidana Korupsi Penggelapan Anggaran DIPA Belanja Barang dan Jasa Satker Polresta Samarinda Tahun Anggaran 2021 periode 1 Januari s.d 15 April 2021.	Rp4.072.216.884
13	Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan pada Perusahaan Daerah (Perusda) Pertambangan Bara Kaltim Sejahtera (BKS) Tahun 2017 s.d. 2020	Rp21.202.001.888
14	Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan dan Jalan Usaha Tani di Kampung Teluk Sumbang Kecamatan Biduk-Biduk Kabupaten Berau Anggaran APBK Kampung Teluk Sumbang TA. 2020 s.d. 2021.	Rp523.878.180
15	Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Hibah Pemerintah Kota Samarinda oleh KONI Kota Samarinda Tahun 2016.	Rp2.633.602.715
16	Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Bantuan Baju Muslim Majelis Taklim yang dikerjakan oleh CV Mitra Buana pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2019	Rp2.852.216.536
Total		Rp70.888.171.788

- b. Pengawasan atas Efektivitas Dana Transfer Umum (APD) melalui Evaluasi Efektivitas Penggunaan Dana Transfer ke Daerah, dengan hasil yaitu:

Tabel 3.8 Rincian Nilai Evaluasi Efektivitas Penggunaan Dana Transfer ke Daerah

No	Nama Penugasan	Hasil Koreksi
1	Evaluasi Efektivitas Penggunaan Dana Transfer ke Daerah pada Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 dan 2023	Rp6.444.753
2	Evaluasi Efektivitas Penggunaan Dana Transfer ke Daerah pada Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 dan 2023	Rp133.335.828
3	Evaluasi Efektivitas Penggunaan Dana Transfer ke Daerah pada Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022 dan 2023	Rp17.549.354
Total		Rp157.329.934

- c. Pengawasan lainnya oleh bidang pengawasan IPP:

Tabel 3.9 Rincian Pengawasan bidang IPP untuk IKK 1.3

No	Nama Penugasan	Hasil Koreksi
1	Laporan Hasil Audit Kinerja Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) Tahun Anggaran 2022 (per 31 Desember 2022) pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Timur	Rp119.000



No	Nama Penugasan	Hasil Koreksi
2	Laporan Hasil Audit atas Pembangunan Gedung C dan D pada Institut Teknologi Kalimantan Tahun 2023 pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Timur	Rp538.173.122
3	Laporan Hasil Reviu atas Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor ATR/BPN pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023	Rp171.716.125
4	Laporan Hasil Audit Dukungan atas Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku)/National Slum Upgrading Project (NSUP) Loan IBRD No 8636 ID pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023	Rp633.700
Total		Rp710.641.947

Faktor Pendukung/Penghambat Pencapaian Kinerja

1. Bekerja sama dengan APH dalam penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi
2. Menjalin hubungan baik dengan pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Timur dengan cara berkomunikasi dan berkoordinasi dengan lebih intens untuk mendapatkan data/informasi
3. PKPT yang dilaksanakan oleh bidang APD belum diarahkan untuk pengawasan keuangan yang menghasilkan insilwas sesuai IKU.

Rencana Tindak

1. Koordinasi secara periodik dengan bidang lain atas hasil pengawasan
2. Mengikutsertakan auditor Bidang Pengawasan Investigasi untuk mengikuti diklat substantif yang dapat mendukung penugasan audit investigatif dan PKA bagi anggota yang belum pernah mengikuti
3. Melakukan pemetaan atas PKPT yang mengarah pada capaian IKU penyelamatan keuangan negara/daerah.
4. Mendorong percepatan tindak lanjut atas hasil rekomendasi pengawasan.

Risiko inherent sesuai aplikasi RMIS yang terdapat pada sastra 1 “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah” antara lain sebagai berikut:

1. Pedoman Pengawasan Terlambat Terbit
2. Pelaksanaan kegiatan pengawasan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
3. Hasil Kegiatan Assurance (Audit, Reviu, Evaluasi, dan Pemantauan) tidak dapat ditindaklanjuti
4. Adanya tuntutan hukum terhadap hasil pengawasan
5. Kegiatan Consulting (Bimbingan Teknis, Asistensi, dan Sosialisasi) tidak selesai tepat waktu
6. Laporan hasil pengawasan terlambat disampaikan dan tidak dapat ditindaklanjuti
7. Pegawai menerima suap terkait hasil pengawasan intern

Atas Risiko tersebut pengendalian yang ada sudah memadai sehingga tidak terdapat risiko residual.

Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional

Rata-rata capaian kinerja “Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional” tahun 2023 adalah 282,19%. Capaian sasaran kegiatan ini diukur dengan menggunakan 4 (empat) indikator kinerja yaitu:

- 1) Jumlah Proyek Strategis Nasional yang tercapai sesuai target
- 2) Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan
- 3) Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang Diawasi
- 4) Persentase rekomendasi strategis yang ditindak lanjuti



Capaian masing-masing indikator kinerja disajikan pada Tabel 3.10.

Tabel 3.10 Target dan Realisasi Sasaran Kegiatan 2

No	Sasprog/Saskeg/IKU	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
II	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional					
2.1	Jumlah Proyek Strategis Nasional yang Tercapai Sesuai Target	PSN	1	8	800,00%	●
2.2	Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	(%) Persen	85	100	117,65%	●
2.3	Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang Diawasi	Kegiatan Prioritas Daerah	2	2	100,00%	●
2.4	Persentase rekomendasi strategis yang ditindaklanjuti	(%) Persen	80,00	88,89	111,11%	●
Capaian Rata-rata					282,19%	

Uraian masing-masing indikator kinerja sasaran kegiatan “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional” adalah sebagai berikut:

a. IKK 2.1 : Jumlah Proyek Strategis Nasional yang tercapai sesuai target

Jumlah Proyek Strategis Nasional yang tercapai sesuai target oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 8 PSN Jumlah PSN yang tercapai sesuai target diukur dengan menghitung Jumlah PSN yang tercapai sesuai target atas total jumlah PSN yang dilakukan pengawasan. Untuk mencapai IKK tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan revidu atas proyek strategis nasional. Tujuan revidu adalah untuk memberikan keyakinan akurasi, keandalan, keabsahan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh menteri/pimpinan lembaga kepada presiden melalui Menteri Keuangan.

Nilai capaian Jumlah Proyek Strategis Nasional yang tercapai sesuai target berdasarkan hasil pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 yaitu sebanyak 8 PP, mencapai 800 % dari target tahun 2023 sebanyak 1 PP.

Jumlah Proyek Strategis Nasional yang Tercapai Sesuai Target pada Tahun 2023 sebanyak 8 PSN, meningkat 300% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebanyak 2 PSN. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra 2024 sebesar 1 PSN. Jumlah Proyek Strategis Nasional yang Tercapai Sesuai Target mencapai 800%.

Nilai realisasi indikator kinerja di atas diperoleh atas hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bidang Pengawasan Akuntan Negara, Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat, dan Bidang Pengawasan Akuntabilitas Pemerintah Daerah sesuai PKPT APP Sektor Percepatan Penyelesaian Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas.

Aktivitas-aktivitas pengawasan penting yang mendukung pencapaian target “Jumlah Proyek Strategis Nasional yang tercapai sesuai target” antara lain sebagai berikut:

- a. Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN) atas Proyek Pembangunan Pelabuhan KEK Maloy Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2023 di Provinsi Kalimantan Timur
- b. Reviu Tata Kelola atas Proyek Strategis Nasional Pembangunan Fasilitas Coal To Methanol (CTM) di Kutai Timur Triwulan I, II, III, IV Tahun 2023
- c. Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN) Pembangunan Jalan Tol Balikpapan – Samarinda Triwulan II dan III Tahun 2023 serta Evaluasi atas Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol Balikpapan – Samarinda pada Provinsi Kalimantan Timur.
- d. Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN) atas Jalan Perbatasan Provinsi Kalimantan Timur Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2023 di Provinsi Kalimantan Timur;
- e. Reviu Tata kelola atas Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Marangkayu Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2023;
- f. Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN) Reforma Agraria Penataan Aset Redistribusi dan Legalisasi Aset Tanah Triwulan III dan IV Tahun 2023 di Provinsi Kalimantan Timur;
- g. Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN) atas Pembangunan Bendungan Sepaku Semoi Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2023;
- h. Reviu Tata Kelola atas Proyek Strategis Nasional (PSN) Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Badan Otorita Ibu Kota Nusantara Triwulan II, III dan IV Tahun 2023;

Faktor Pendukung/Penghambat Pencapaian Kinerja

- a. Program kerja yang telah direncanakan dapat direalisasikan secara tepat waktu.
- b. Kolaborasi dan koordinasi antar bidang terkait penugasan khusus PSN.

Rencana Tindak

- a. Mendorong percepatan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan;
- b. Mempertahankan komunikasi antar bidang dan *stakeholders*.

b. IKK 2.2 : Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan

Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur sebesar 100%. Salah satu aktivitas pengawasan BPKP adalah Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan (EHKP). Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP) didefinisi sebagai sebuah kondisi dimana proses pembangunan tidak dapat mencapai *output*, *outcome*, dan manfaat yang telah ditetapkan karena adanya masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan kewenangan para pihak terkait. Penugasan EHKP tersebut pada dasarnya adalah *case-based* yang bersumber dari pengembangan hasil pengawasan, *current issues*, atau permintaan instansi/Badan Usaha (BU).

Indikator persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan dihitung berdasarkan proporsi hasil penugasan EHKP yang efektif (kesepakatan penyelesaian hambatan terwujud dan dilaksanakan) terhadap total penugasan HKP.

Realisasi persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan pada tahun 2023 adalah sebanyak 100% atau mencapai 117,65% dari target sebanyak 85%.



Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan pada Tahun 2023 sebesar 100% tetap 100% dengan capaian Tahun 2022. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra 2024 sebesar 85% realisasi Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan mencapai 117,65%.

Nilai realisasi indikator kinerja di atas diperoleh atas hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bidang Pengawasan Investigasi sesuai PKPT APP/APPD Sektor Reforma Agraria dan Ketahanan Pangan.

Aktivitas-aktivitas pengawasan penting yang mendukung pencapaian target "Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan" antara lain sebagai berikut:

- a. Reforma Agraria
Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan Lintas Sektoral Reforma Agraria di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
- b. Ketahanan Pangan
Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan Ketahanan Pangan di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur

Faktor Pendukung/Penghambat Pencapaian Kinerja

1. Menjalin hubungan baik dengan pemerintah se-Provinsi Kalimantan Timur dengan cara berkomunikasi dan berkoordinasi dengan lebih intens untuk mendapatkan informasi/data
2. Kualitas sumber daya manusia yang memadai dalam pelaksanaan pengawasan

Rencana Tindak

1. Koordinasi secara teratur dengan pemerintah se-Provinsi Kalimantan Timur
2. Meningkatkan dan mempertahankan kualitas sumber daya manusia dengan cara mengikuti diklat substantif bagi yang belum pernah mengikuti
3. Optimalisasi manajemen sumber daya dan waktu penugasan yang efektif.

c. IKK 2.3: Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang Diawasi

*Jumlah Kegiatan
Pembangunan Prioritas
Daerah yang Diawasi oleh
Perwakilan BPKP Provinsi
Kalimantan Timur
sebanyak 2 KP*

Indikator jumlah kegiatan pembangunan prioritas daerah yang diawasi dihitung berdasarkan jumlah kegiatan pembangunan yang menjadi bagian program prioritas pemerintah daerah yang dilakukan pengawasan oleh BPKP.

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan Agenda Prioritas Pembangunan Daerah sebanyak 2 topik yaitu Program Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan Sawit dan Program Pengelolaan Komoditas Tanaman Pangan.

Realisasi jumlah kegiatan pembangunan prioritas daerah yang diawasi berdasarkan hasil pengawasan BPKP tahun 2023 yaitu sebanyak 2 kegiatan prioritas daerah atau mencapai 100% dari target tahun 2023 sebanyak 2 kegiatan.

Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang Diawasi pada Tahun 2023 sebanyak 2 Kegiatan tetap 100% dengan



capaian Tahun 2022 sebanyak 2 Kegiatan dan tidak dapat dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra 2024 karena IKK ini tidak ditargetkan pada Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024.

Nilai realisasi indikator kinerja di atas diperoleh dari pelaksanaan PKPT Agenda Prioritas Pengawasan Daerah (APPD) yang dilakukan oleh Bidang Pengawasan Akuntabilitas Pemerintah Daerah, antara lain sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan Sawit
 - 1) Pengumpulan data Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit Provinsi Kalimantan Timur
 - 2) Pengawasan atas Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit Provinsi Kalimantan Timur.
 - 3) Monitoring atas Tindak Lanjut (TL) Pengawasan Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit Provinsi Kalimantan Timur
- b. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan
 - 1) Pengumpulan data Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Pangan yang Handal di Provinsi Kalimantan Timur
 - 2) Pengawasan atas Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Pangan yang Handal di Provinsi Kalimantan Timur
 - 3) Monitoring atas Tindak Lanjut (TL) Pengawasan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan di Provinsi Kalimantan Timur

Faktor Pendukung/Penghambat Pencapaian Kinerja

1. Koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah sehingga data dapat diperoleh dengan mudah.
2. Kualitas dan kuantitas sumber daya yang memadai dalam pelaksanaan pengawasan.
3. Program pengawasan yang sesuai dengan isu strategis dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah.

Rencana Tindak

Melanjutkan kerja sama yang baik dengan pemerintah daerah serta melakukan monitoring atas tindak lanjut saran dari hasil pengawasan

d. IKK 2.4 : Persentase rekomendasi strategis yang ditindak lanjuti

*Persentase rekomendasi strategis yang ditindak lanjuti oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur sebesar **88,89%***

Persentase rekomendasi strategis yang ditindaklanjuti diukur dengan menghitung jumlah rekomendasi strategis yang telah ditindaklanjuti dibagi total rekomendasi strategis pada laporan gubernur dikali 100%.

Realisasi persentase rekomendasi strategis yang ditindaklanjuti pada tahun 2023 adalah sebanyak 88,89% atau mencapai 111,11% dari target sebesar 80%



Persentase rekomendasi strategis yang ditindaklanjuti sebesar pada Tahun 2023 88,89% turun 11,11% dengan capaian Tahun 2022 dan tidak dapat dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra 2024 karena IKK ini tidak ditargetkan pada Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024.

Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja

Komitmen dan kerjasama yang baik antara mitra kerja dengan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur.

Rencana Tindak

1. Meningkatkan efektivitas mekanisme Surat Penegasan ke-2 dan Surat Penegasan ke-3 atas laporan hasil pengawasan yang belum direspon auditan dan diinput ke dalam aplikasi SIMA.
2. Melakukan monitoring berkelanjutan terhadap tindak lanjut atas hasil pengawasan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi
3. Mempertahankan hubungan yang baik antara mitra kerja dengan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur

Risiko inherent sesuai aplikasi RMIS yang terdapat pada sastra 2 “Meningkatnya Pengawasan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional” antara lain sebagai berikut:

1. Respon terhadap permintaan layanan belum memenuhi kebutuhan pengguna
2. Tim yang akan ditugaskan tidak tersedia
3. Hasil pengawasan tidak digunakan oleh stakeholder
4. Kualitas barang/jasa tidak sesuai dengan spesifikasi teknis/kuantitas pada kontrak
5. Stakeholder terlambat menyampaikan data/tanggapan
6. Rekomendasi strategis diberikan oleh tim BPKP tidak relevan dengan kondisi/permasalahan yang ada

Atas Risiko tersebut pengendalian yang ada sudah memadai sehingga tidak terdapat risiko residual.

Sasaran Kegiatan 3 : Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha

Rata-rata capaian kinerja “Sasaran Kegiatan 3: Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha” adalah 143,42%. Pencapaian sasaran kegiatan ini diukur dengan menggunakan 5 (lima) indikator kinerja, yaitu:

1. Jumlah BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik
2. Jumlah BUMD dengan kinerja sehat
3. Jumlah BLUD dengan kinerja sehat
4. Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan
5. Jumlah BUMDes yang memberikan kontribusi pada perekonomian desa

Capaian masing-masing indikator kinerja disajikan pada Tabel 3.11

Tabel 3.11 Target dan Realisasi Sasaran Kegiatan 3

No	Sasprog/Saskeg/IKU	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
III	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha					
3.1	Jumlah BUMD dengan Pengelolaan Korporasinya Baik	BUMD	2	2	100,00%	●
3.2	Jumlah BUMD dengan Kinerja Sehat	BUMD	10	11	110,00%	●



No	Sasprog/Saskeg/IKU	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
3.3	Jumlah BLUD dengan Kinerja Sehat	BLUD	2	3	150,00%	●
3.4	Jumlah BUMDes yang Mampu Menyusun Laporan	BUMDes	51	61	119,61%	●
3.5	Jumlah BUMDes yang memberikan kontribusi pada perekonomian desa	BUMDes	8	19	237,50%	●
Capaian Rata-rata					143,42%	

Uraian masing-masing indikator kinerja sasaran kegiatan “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha” adalah sebagai berikut.

Gambar 3.1 Realisasi IKK 3.1, IKK 3.2, IKK 3.3

IKK 3.1 BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik



IKK 3.2 BUMD dengan kinerja sehat



IKK 3.3 BLUD dengan kinerja sehat





a. IKK 3.1 : Jumlah BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik

Jumlah BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik di Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 2 BUMD

Jumlah BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik dengan *mapping* atas pemenuhan aspek penerapan Good Corporate Governance (GCG). Evaluasi dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan dan implementasi atas aspek-aspek penerapan Good Corporate Governance (GCG).

Realisasi Jumlah BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik berdasarkan hasil pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 yaitu sebanyak 2 BUMD atau sebesar 100% dari target setahun sebanyak 2 BUMD.

Jumlah BUMD dengan Pengelolaan Korporasinya Baik pada Tahun 2023 sebanyak 2 BUMD naik 100% dari realisasi tahun 2022 sebanyak 1 BUMD. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra 2024 sebanyak 3 BUMD realisasi Jumlah BUMD dengan Pengelolaan Korporasinya Baik mencapai 66,67%

Nilai realisasi indikator kinerja di atas diperoleh atas hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bidang Pengawasan Akuntan Negara sesuai PKPT dalam APP Sektor Akuntabilitas Keuangan Negara, Daerah dan Desa yaitu Pengawasan atas BUMN.

2 BUMD dengan pengelolaan korporasi baik tersebut adalah PT BPD Kaltim Kaltara (Bankaltimtara) dan Perumdam Tirta Kencana Samarinda. Aktivitas-aktivitas pengawasan penting pada tahun 2023 yang mendukung pencapaian target "Jumlah BUMD dengan pengelolaan korporasinya baik" antara lain sebagai berikut:

- a. Bimbingan teknis penyusunan Infrastruktur Penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda; dan
- b. Asesmen Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Tahun 2022 pada Perumdam Tirta Kencana Samarinda.

Faktor Pendukung/Penghambat Pencapaian Kinerja

Faktor-faktor yang mendukung tercapainya jumlah BUMD dengan pengelolaan korporasi yang baik, diantaranya:

- 1) Adanya sosialisasi dan pendampingan dalam penyusunan infrastruktur dan implementasi penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada BUMD di Provinsi Kalimantan Timur secara bertahap;
- 2) Adanya komitmen bersama dengan BUMD dalam menerapkan Good Corporate Governance (GCG);
- 3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengawasan melalui program pelatihan mandiri.

Rencana Tindak

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur akan melakukan:

- 1) Melakukan monitoring atas tindak lanjut Area of Improvement (Aoi) hasil evaluasi;
- 2) Optimalisasi manajemen sumber daya dan waktu penugasan yang efektif.



b. IKK 3.2 : Jumlah BUMD dengan kinerja sehat

Jumlah BUMD dengan kinerja sehat Tahun 2023 sebanyak 11 BUMD

Dalam rangka mencapai *return* tinggi, BUMD harus memiliki tingkat kesehatan yang memadai. Tingkat kesehatan BUMD ditetapkan berdasarkan kinerja perusahaan yang meliputi aspek keuangan, operasional, dan administrasi.

Pencapaian IKK ini diukur dengan menghitung jumlah BUMD dengan kinerja minimal "sehat" dibagi dengan jumlah BUMD yang dievaluasi Tahun 2023.

Jumlah BUMD dengan kinerja sehat berdasarkan hasil pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 yaitu sebanyak 11 BUMD, mencapai 110% dari target tahun 2023 sebanyak 10 BUMD.

Jumlah BUMD dengan Kinerja Sehat pada Tahun 2023 sebanyak 11 BUMD naik 22,22% dari realisasi tahun 2022 sebanyak 9 BUMD. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra 2024 sebanyak 10 BUMD realisasi Jumlah BUMD dengan Kinerja Sehat mencapai 110%

Nilai realisasi indikator kinerja di atas diperoleh atas hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bidang Pengawasan Akuntan Negara sesuai PKPT dalam APP Sektor Akuntabilitas Keuangan Negara, Daerah dan Desa yaitu Pengawasan Akuntabilitas Jasa Air dan Pengawasan Akuntabilitas BUMD.

Aktivitas-aktivitas pengawasan penting di tahun 2023 yang mendukung pencapaian target "jumlah BUMD dengan kinerja sehat" antara lain sebagai berikut:

a. BUMD (Fokus pada BU Jasa Air)

- 1) Evaluasi kinerja pada Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda Tahun Buku 2022;
- 2) Evaluasi kinerja pada Perumdam Tirta Taman Kota Bontang Tahun Buku 2022;
- 3) Evaluasi kinerja pada Perumdam Tirta Manuntung Kota Balikpapan Tahun Buku 2022;
- 4) Evaluasi kinerja pada Perumdam Tirta Kandilo Kabupaten Paser Tahun Buku 2022;
- 5) Evaluasi kinerja pada Perumdam Tirta Tuah Benua Kabupaten Kutai Timur Tahun Buku 2022;
- 6) Evaluasi kinerja pada Perumdam Tirta Mahakam Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Buku 2022;
- 7) Evaluasi kinerja pada Perumdam Tirta Sendawar Kabupaten Kutai Barat Tahun Buku 2022;
- 8) Evaluasi kinerja pada Perumdam Danum Taka Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Buku 2022; dan
- 9) Evaluasi kinerja pada Perumdam Batiwakkal Kabupaten Berau Tahun Buku 2022.

b. BUMD (Fokus BUMD Aneka Usaha)

- 1) Evaluasi Kinerja Perusda Pertambangan Bara Kaltim Sejahtera (BKS) Tahun Buku 2022;
- 2) Evaluasi Kinerja PT Migas Mandiri Pratama (MMP) Kalimantan Timur Tahun Buku 2022;



- 3) Evaluasi Kinerja Perseroda Kukar Sejahtera Dambaan Etam (KSDE) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Buku 2022; dan
- 4) Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah Melati Bhakti Setya (MBS) Provinsi Kalimantan Timur Tahun Buku 2022.

Faktor Pendukung/Penghambat Pencapaian Kinerja

Dalam pencapaian target yang telah ditetapkan maka terdapat faktor-faktor pendukung atas tercapainya 11 BUMD dengan kinerja sehat, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Melakukan pendampingan dalam pelaksanaan penilaian mandiri BUMD;
- 2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengawasan melalui program pelatihan mandiri.

Rencana Tindak

Agar dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur akan melakukan:

- 1) Mendorong percepatan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan
- 2) Melaksanakan kegiatan pengawasan sesuai dengan target kegiatan pengawasan yang telah ditentukan.

c. IKK 3.3 : Jumlah BLUD dengan kinerja sehat

Jumlah BLUD dengan kinerja baik Tahun 2023 sebanyak 3 BLUD

Pencapaian IKK ini diukur dengan menghitung jumlah BLUD yang tata kelola minimal "baik" dibagi dengan jumlah BLUD yang dievaluasi Tahun 2023.

Penilaian kinerja BLUD yang dilakukan oleh BPKP menggunakan kriteria sebagai berikut:

- 1) Evaluasi Kinerja Keuangan dan Operasional/Pelayanan;
- 2) Evaluasi Tata Kelola; dan
- 3) Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Jumlah BLUD dengan kinerja sehat berdasarkan hasil pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 yaitu sebanyak 3 BLUD, mencapai 150% dari target tahun 2023 sebanyak 2 BLUD. 3 BLUD tersebut yaitu RSUD Abdul Wahab Sjahranie, RSUD Aji Muhammad Parikesit, RSUD Ratu Aji Putri Botung.

Jumlah BLUD dengan Kinerja Sehat pada Tahun 2023 sebanyak 3 BLUD naik 50% dari realisasi tahun 2022 sebanyak 2 BLUD. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra 2024 sebanyak 2 BLUD realisasi Jumlah BLUD dengan Kinerja Sehat mencapai 150%.

Nilai realisasi indikator kinerja di atas diperoleh atas hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bidang Pengawasan Akuntan Negara sesuai PKPT dalam APP Sektor Akuntabilitas Keuangan Negara, Daerah dan Desa yaitu Pengawasan atas BLU/D.

Aktivitas-aktivitas pengawasan penting di tahun 2023 yang mendukung pencapaian target "jumlah BLUD dengan kinerja sehat" antara lain sebagai berikut:



- a. Melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengawasan melalui program pelatihan mandiri.
- b. Melakukan evaluasi kinerja Badan Layanan Umum Daerah RSUD Abdoel Wahab Sjahranie Kota Samarinda Tahun Buku 2022;
- c. Melakukan evaluasi Kinerja pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Buku 2022;
- d. Melakukan evaluasi Kinerja pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Aji Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Buku 2022.

Faktor Pendukung/Penghambat Pencapaian Kinerja

Upaya-upaya penting yang telah dilakukan dalam Tahun 2023 untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut di atas antara lain yaitu:

- 1) Memberikan saran atas permasalahan dalam proses pelaksanaan penilaian kinerja BLUD.
- 2) Memberikan pendampingan dalam pelaksanaan penilaian kinerja BLUD.

Rencana Tindak

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur akan melakukan:

- 1) Melakukan monitoring atas tindak lanjut Area of Improvement (Aoi) hasil evaluasi;
- 2) Optimalisasi manajemen sumber daya dan waktu penugasan yang efektif.

a. IKK 3.4 : Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan

Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan sampai dengan Tahun 2023 sebanyak
61 BUMDes

Pencapaian IKK ini diukur dengan menghitung jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan keuangan setelah dilakukan pendampingan oleh BPKP.

Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan keuangan sampai dengan tahun 2023 yaitu sebanyak 61 BUMDes, mencapai 119,61% dari target tahun 2023 sebanyak 51 BUMDes.

Jumlah BUMDes yang Mampu Menyusun Laporan pada Tahun 2023 sebanyak 61 BUMDes naik 27,08% dari realisasi tahun 2022 sebanyak 48 BUMDes. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra 2024 sebanyak 57 BUMDes realisasi Jumlah BUMDes yang Mampu Menyusun Laporan mencapai 107,02%.

Aktivitas-aktivitas pengawasan penting di tahun 2023 yang mendukung pencapaian target "Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan" antara lain berasal dari kegiatan:

- 1) Evaluasi Akuntabilitas dan Tata Kelola BUM Desa Tahun 2023 pada Kabupaten Kutai Kartanegara yang dilakukan pada 17 BUMDes; dan
- 2) Monitoring BUM Desa pada Kabupaten Penajam Paser utara yang dilakukan pada 9 BUMDes.

Faktor Pendukung/Penghambat Pencapaian Kinerja

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam tercapainya 100% target BUMDes yang menyusun laporan keuangan, diantaranya:

- 1) Melaksanakan pendampingan dan Bimbingan Teknis kepada BUMDesa di Provinsi Kalimantan Timur



- 2) Melaksanakan Monitoring atas pendampingan yang telah dilaksanakan.

Rencana Tindak

Untuk mempertahankan kinerja, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur akan melakukan

- 1) Mendorong percepatan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan
- 2) Memberikan pendampingan dalam proses penyusunan laporan BUMDes;
- 3) Melaksanakan kegiatan pengawasan sesuai dengan target kegiatan pengawasan yang telah ditentukan.

b. IKK 3.5 : Jumlah BUMDes yang memberikan kontribusi pada perekonomian desa

Jumlah BUMDes yang memberikan kontribusi pada perekonomian desa
19 BUMDes

Jumlah BUMDes yang memberikan kontribusi pada perekonomian desa diukur dengan jumlah BUMDes yang memberikan kontribusi pada perekonomian desa, masyarakat, serta meningkatkan potensi desa berupa penyeteroran PADes ke desa berdasarkan hasil uji petik evaluasi peran BUMDesa dalam pengembangan potensi desa.

Jumlah BUMDes yang memberikan kontribusi pada perekonomian desa sampai dengan tahun 2023 yaitu sebanyak 19 BUMDes, mencapai 237,5% dari target tahun 2023 sebanyak 8 BUMDes.

Jumlah BUMDes yang memberikan kontribusi pada perekonomian desa pada Tahun 2023 sebanyak 19 BUMDes naik 171,43% dari realisasi tahun 2022 sebanyak 7 BUMDes dan tidak dapat dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra 2024 karena IKK ini tidak ditargetkan pada Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024.

Faktor Pendukung/Penghambat Pencapaian Kinerja

- 1) Melaksanakan pendampingan dan Bimbingan Teknis kepada BUMDesa di Provinsi Kalimantan Timur
- 2) Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas dan Tata Kelola BUMDesa
- 3) Melaksanakan Monitoring atas pendampingan yang telah dilaksanakan

Rencana Tindak

Untuk mempertahankan kinerja, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur akan melakukan:

- 1) Mendorong percepatan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan
- 2) Melaksanakan kegiatan pengawasan sesuai dengan target kegiatan pengawasan yang telah ditentukan

Risiko inherent sesuai aplikasi RMIS yang terdapat pada sastra 3 “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha” antara lain sebagai berikut:

1. Kualitas Kegiatan Consulting (Bimbingan Teknis, Asistensi, dan Sosialisasi) kurang optimal
2. Laporan hasil pengawasan terlambat disampaikan
3. Ketersediaan sumber daya manusia yang kurang dalam rangka pemenuhan kebutuhan unit kerja
4. Temuan hasil pemeriksaan tidak dapat ditindaklanjuti
5. *Stakeholder* terlambat menyampaikan data/tanggapan
6. Pihak terkait (mitra kerja, masyarakat, dll) tidak memahami permintaan informasi (survei, kuesioner, observasi, dsb)
7. Rekomendasi strategis diberikan oleh tim BPKP tidak relevan dengan kondisi/permasalahan yang ada

Atas Risiko tersebut pengendalian yang ada sudah memadai sehingga tidak terdapat risiko residual.



Sasaran Kegiatan 4 : Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi

Rata-rata capaian kinerja "Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi" tahun 2023 adalah 96,08%. Capaian sasaran kegiatan ini diukur dengan menggunakan 4 (empat) indikator kinerja yaitu:

1. Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti
2. Persentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti
3. Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik
4. Jumlah Badan Usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik

Capaian masing-masing indikator kinerja disajikan pada Tabel 3.12

Tabel 3.12 Target dan Realisasi Sasaran Kegiatan 4

No	Sasprog/Saskeg/IKU	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
IV Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi						
4.1	Persentase Hasil Pengawasan Represif yang Dimanfaatkan/ Ditindaklanjuti	(%) Persen	100	100	100,00%	●
4.2	Persentase Hasil Pengawasan Preventif dan Edukatif yang Dimanfaatkan/Ditindaklanjuti	(%) Persen	85	100	117,65%	●
4.3	Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik	Pemda	3	2	66,67%	●
4.4	Jumlah Badan Usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik	Badan Usaha	1	1	100,00%	●
Capaian Rata-rata					96,08%	

Uraian masing-masing indikator kinerja sasaran kegiatan "Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi" adalah sebagai berikut.

a. **IKK 4.1 : Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan /ditindaklanjuti**

Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti sebesar 100% Pencapaian IKK persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti diukur dengan menghitung jumlah KLPBU/APH yang menindaklanjuti rekomendasi dibagi jumlah penugasan pengawasan represif yang dilakukan oleh BPKP.

Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti berdasarkan hasil pengawasan Perwakilan BPKP Kalimantan Timur tahun 2023 yaitu sebesar 100% atau mencapai 100% dari target tahun 2023.

Persentase Hasil Pengawasan Represif yang Dimanfaatkan/Ditindaklanjuti pada Tahun 2023 sebesar 100% tetap dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar 100%. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra 2024 realisasi Persentase Hasil Pengawasan Represif yang Dimanfaatkan/Ditindaklanjuti telah mencapai 100%

Ringkasan persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti disajikan pada tabel 3.13.

Tabel 3.13 Ringkasan Persentase Hasil Pengawasan Represif Yang Dimanfaatkan/Ditindaklanjuti Tahun 2023

No	Jenis Kegiatan Pengawasan	Realisasi (%)
1	Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pengadaan Plasma Nanobubble untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Manuntung Kota Balikpapan TA. 2021	100
2	Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pembangunan Masjid Darul Falah Kabupaten Kutai Kartanegara yang bersumber dari Dana Hibah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur TA 2017	100
3	Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kegiatan Pembangunan Embung di Desa Bukit Pariaman Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara TA. 2020	100
4	Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kutai Barat pada Perusahaan Daerah Witeltram Tahun Anggaran 2019-2020	100
5	Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pengelolaan Dana Desa (DD), Anggaran Dan Kampung (ADK) dan Bantuan Keuangan di Kampung Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2019-2020	100
6	Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Program Rehabilitasi Mangrove Tahun Anggaran 2021 di Wilayah Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dengan Pelaksana Kelompok Tani Labuangkallo Mandiri Kecamatan Tanjung Harapan	100
7	Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembayaran Uang Ganti Rugi Perumahan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur	100
8	Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengusulan dan Realisasi Anggaran Hibah kepada KONI Kabupaten Berau TA. 2019 s.d. 2022	100
9	Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Bantuan Seragam dan Perlengkapan Sekolah bagi Siswa Baru Jenjang TK/PAUD/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA dan SLB pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2020	100
10	Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana Hibah Pemerintah Kota Samarinda oleh KONI Kota Samarinda Tahun 2016.	100
11	Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Bantuan Baju Muslim Majelis Taklim yang dikerjakan oleh CV Mitra Buana pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2019	100
12	PKA kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Samarinda atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Penyalahgunaan Fasilitas Kredit Debitur Tahun 2019-2021 di BRI Unit Bengkuring, BRI Unit Sungai Dama, dan BRI Unit Karangpaci pada Kantor BRI Cabang Samarinda 1. Bahwa PKA tersebut bukan merupakan tindak lanjut atas audit dalam rangka PKN atas dugaan TPK tersebut di atas.	100
13	Audit PKN Tindak Pidana Korupsi Penggelapan Anggaran DIPA Belanja Barang dan Jasa Satker Polresta Samarinda Tahun Anggaran 2021 periode 1 Januari s.d 15 April 2021.	100

No	Jenis Kegiatan Pengawasan	Realisasi (%)
14	Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan pada Perusahaan Daerah (Perusda) Pertambangan Bara Kaltim Sejahtera (BKS) Tahun 2017 s.d. 2020	
15	Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Dana Hibah KONI Kab. Kutai Kartanegara yang berasal dari APBD Murni dan APBD-P Kab. Kutai Kartanegara TA. 2020 dan TA. 2021.	100
Jumlah		100

Faktor Pendukung/Penghambat Pencapaian Kinerja

1. Bekerja sama dengan APH dalam penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi
2. Menjalin hubungan baik dengan pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Timur dengan cara berkomunikasi dan berkoordinasi dengan lebih intens untuk mendapatkan data/informasi
3. Melakukan kegiatan pemberian keterangan ahli dengan bersikap profesional baik di hadapan penyidik maupun persidangan

Rencana Tindak

1. Koordinasi secara periodik dengan bidang lain atas hasil pengawasan
2. Mengikutsertakan auditor Bidang Pengawasan Investigasi untuk mengikuti diklat substantif yang dapat mendukung penugasan audit investigatif dan PKA bagi anggota yang belum pernah mengikuti.
3. Melakukan pemberian keterangan ahli sesuai dengan Kode Etik dan Standar Audit Internal yang berlaku

a. IKK 4.2 : Persentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti

Persentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti sebesar 100% Pencapaian IKK persentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti diukur dengan menghitung jumlah KLPBU/APH yang menindaklanjuti rekomendasi dibagi jumlah penugasan pengawasan preventif dan edukatif yang dilakukan oleh BPKP.

Persentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti berdasarkan hasil pengawasan BPKP tahun 2023 yaitu sebesar 100% atau mencapai 117,65% dari target tahun 2023.

Persentase Hasil Pengawasan Preventif dan Edukatif yang Dimanfaatkan/Ditindaklanjuti pada Tahun 2023 sebesar 100%, naik 25% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar 80%. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra 2024 sebesar 90% realisasi Persentase Hasil Pengawasan Preventif dan Edukatif yang Dimanfaatkan/Ditindaklanjuti mencapai 111,11%.



Aktivitas-aktivitas pengawasan penting yang mendukung pencapaian target "Persentase hasil pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti" antara lain sebagai berikut:

- a. P3DN
Penilaian Risiko atas Kepatuhan, Kinerja, Korupsi dan Hambatan Kelancaran Pembangunan (KKKHKP) pada Program P3DN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022-2023
- b. Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pemilu
 - 1) Penilaian Risiko Kecurangan atas Perencanaan/Penganggaran Pemilu dan Pilkada serta Pengadaan Logistik dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - 2) Penilaian Risiko Kecurangan atas Perencanaan/Penganggaran Pemilu dan Pilkada serta Pengadaan Logistik dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap pada Badan Pengawasan Pemilu Provinsi Kalimantan Timur, Badan Pengawasan Pemilu Kota Samarinda, dan Badan Pengawasan Pemilu Kabupaten Kutai Kartanegara.
- c. Pengendalian Kecurangan dan Hambatan Kelancaran Pembangunan
 - 1) Bimbingan Peningkatan IEPK dalam rangka Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kota Samarinda.
 - 2) *Coaching Clinic* Audit Tujuan Tertentu Dugaan Laporan Pungutan Retribusi yang tidak masuk ke Kas Daerah Kota Samarinda pada Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Audit Tujuan Tertentu Dugaan Pelanggaran Disiplin Mengenai Pungutan Alat Pemadam Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda Tahun 2021 s/d Juni 2022, dan Audit Investigatif dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan Jasa Kebersihan/Cleaning Service pada Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2020-2021.
 - 3) Kegiatan Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK) di Politeknik Negeri Samarinda.
 - 4) *Coaching Clinic* pada Inspektorat Kota Samarinda atas Audit Investigatif Penyimpangan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Fisik Pasar Rakyat Harapan Baru Tahun 2018.
 - 5) Pengukuran Efektivitas Pengendalian Korupsi pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana Kota Samarinda

Faktor Pendukung/Penghambat Pencapaian Kinerja

1. Berkoordinasi dengan bidang pengawasan lain untuk mendapatkan *stakeholder* yang bersedia melakukan upaya preventif terhadap *fraud* dalam proses bisnis organisasi
2. Auditor bidang pengawasan Investigasi mengikuti diklat substantif yang berkaitan dengan penyusunan profil risiko dan pencegahan risiko

Rencana Tindak

1. Meningkatkan sosialisasi penting pencegahan fraud kepada organisasi perangkat daerah (OPD) pemerintah daerah dan masyarakat umum
2. Mengikutsertakan auditor bidang pengawasan Investigasi mengikuti diklat substantif yang berkaitan dengan penyusunan profil risiko bagi yang belum pernah mengikuti



b. IKK 4.3 : Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik

Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik sebanyak 2 Pemda

Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi baik diukur dengan menghitung Jumlah Pemda dengan skor indeks efektivitas pengendalian korupsi baik, yang merupakan komposit skor atas tiga pilar: kapabilitas, keberterapan (*implementedness*) strategi pencegahan, dan penanganan keterjadian.

Jumlah Pemda yang menindaklanjuti Area of Improvement dari hasil pengukuran Efektivitas EPK yaitu sebanyak 2 Pemda atau mencapai 66,67% dari target tahun 2023 sebanyak 3 Pemda.

Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik pada Tahun 2023 sebanyak 2 Pemda tetap 100% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebanyak 2 Pemda. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra 2024 sebanyak 4 Pemda realisasi Jumlah Pemda dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik mencapai 50%.

Aktivitas-aktivitas pengawasan penting yang mendukung pencapaian target "Jumlah Pemda yang menindaklanjuti Area of Improvement dari hasil pengukuran EPK" antara lain sebagai berikut:

1. Bimbingan Peningkatan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) dalam rangka Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kota Samarinda
2. Bimtek Antikorupsi dalam Pelaksanaan Fungsi dan Tahapan Perencanaan sebagai Upaya Peningkatan Capaian Efektifitas Pengendalian Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser
3. *Coaching Clinic* Audit Tujuan Tertentu Dugaan Laporan Pungutan Retribusi yang tidak masuk ke Kas Daerah Kota Samarinda pada Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Audit Tujuan Tertentu Dugaan Pelanggaran Disiplin Mengenai Pungutan Alat Pemadam Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda Tahun 2021 s/d Juni 2022, dan Audit Investigatif dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan Jasa Kebersihan/*Cleaning Service* pada Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2020-2021
4. Kegiatan Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi (MPAK) di Politeknik Negeri Samarinda
5. *Coaching Clinic* pada Inspektorat Kota Samarinda atas Audit Investigatif Penyimpangan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Fisik Pasar Rakyat Harapan Baru Tahun 2018
6. Pendampingan Penyusunan Dokumen Rencana Pengendalian Risiko Kecurangan (*Fraud Control Plan*) Satpol. PP Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara TA. 2023 dan 2024
7. Narasumber dalam kegiatan Workshop Satgas Saber Pungli Provinsi Kaltim dengan tema Pencegahan dan Pemberantasan Pungli di Perguruan Tinggi.
8. Narasumber dalam Kegiatan Kampanye Membudayakan *Anti Fraud*
9. Narasumber Sosialisasi Anti Korupsi Bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kota Bontang
10. Narasumber pada Kegiatan Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi pada Pemerintah Daerah se-Kalimantan Timur.

**Faktor Pendukung/Penghambat Pencapaian Kinerja**

1. Belum dilakukan validasi seluruhnya terhadap pengajuan OPD yang telah selesai dilakukan penilaian maturitas SPIP di Provinsi Kaltim hingga triwulan IV TA 2023
2. Keterbatasan SDM yang diprioritaskan untuk melaksanakan jadwal penugasan PKPT dan APP lainnya.

Rencana Tindak

1. Berkoordinasi dengan bidang APD untuk menentukan lokus bimtek peningkatan IEPK di TA 2024
2. Manajemen sumber daya untuk memprioritaskan penugasan yang menunjang capaian target perkin dan APP

c. IKK 4.4 : Jumlah Badan Usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik

Jumlah Badan Usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik sebanyak 1 Badan Usaha

Pencapaian IKK Jumlah Badan Usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik diukur dengan menghitung Jumlah Badan Usaha dengan skor indeks efektivitas pengendalian korupsi baik, yang merupakan komposit skor atas tiga pilar: kapabilitas, keberterapan (*implementedness*) strategi pencegahan, dan penanganan keterjadian.

Jumlah Badan Usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik yaitu sebanyak 1 Badan Usaha atau mencapai 100% dari target tahun 2023 sebanyak 1 Badan Usaha.

Jumlah Badan Usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik pada Tahun 2023 sebanyak 1 Badan Usaha, tidak dapat dibandingkan dengan capaian Tahun 2022 karena tidak ditargetkan. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra 2024 sebanyak 2 Badan Usaha realisasi Jumlah Badan Usaha dengan efektivitas pengendalian korupsi Baik mencapai 50%.

Aktivitas pengawasan penting yang mendukung pencapaian target Pengukuran Efektivitas Pengendalian Korupsi pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana Kota Samarinda

Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja

Koordinasi dengan Bidang Akuntan Negara untuk menentukan lokus

Rencana Tindak

Berkoordinasi dan menjalin hubungan baik dengan Badan Usaha di wilayah Provinsi Kalimantan Timur



Risiko inherent sesuai aplikasi RMIS yang terdapat pada sastra 4 “Meningkatnya Pengawasan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi” antara lain sebagai berikut:

1. *Fraud Control Plan* (FCP) gagal diterapkan
2. Hasil kegiatan pengawasan tidak sesuai ekspektasi stakeholder
3. Rekomendasi strategis diberikan oleh tim BPKP tidak relevan dengan kondisi/permasalahan yang ada
4. Tim audit gagal dalam mendapatkan bukti (cukup, kompeten dan relevan) dan menentukan metode penghitungan kerugian keuangan negara
5. Simpulan hasil audit investigasi berbeda dengan simpulan hasil audit operasional
6. Auditor pemberi keterangan ahli dituduh oleh pihak ketiga telah memberikan keterangan palsu
7. Adanya tuntutan hukum terhadap hasil pengawasan
8. Ahli keliru dalam pemberian keterangan ahli

Atas Risiko tersebut pengendalian yang ada sudah memadai sehingga tidak terdapat risiko residual.

Sasaran Kegiatan 5 : Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU

Rata-rata capaian kinerja “Sasaran Kegiatan 5: Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU” tahun 2023 adalah 114,48%. Capaian sasaran kegiatan ini diukur dengan menggunakan 13 (tiga belas) indikator kinerja, yaitu:

1. Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP > Level 3
2. Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP > Level 3
3. Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP > Level 3
4. Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP > Level 3
5. Jumlah Provinsi dengan MRI > Level 3
6. Jumlah Kab/Kota dengan MRI > Level 3
7. Jumlah Pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah
8. Jumlah Desa yang pengelolaan keuangannya akuntabel
9. Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai
10. Jumlah BUMD dengan MRI > Level 3
11. Jumlah BLU/D dengan MRI >= Level 3
12. Jumlah BUMD dengan Kapabilitas SPI >= Level 3
13. Jumlah BLU/D dengan Kapabilitas SPI >= Level 3

Capaian masing-masing indikator kinerja disajikan pada Tabel 3.14

Tabel 3.14
Target dan Realisasi Sasaran Kegiatan 5

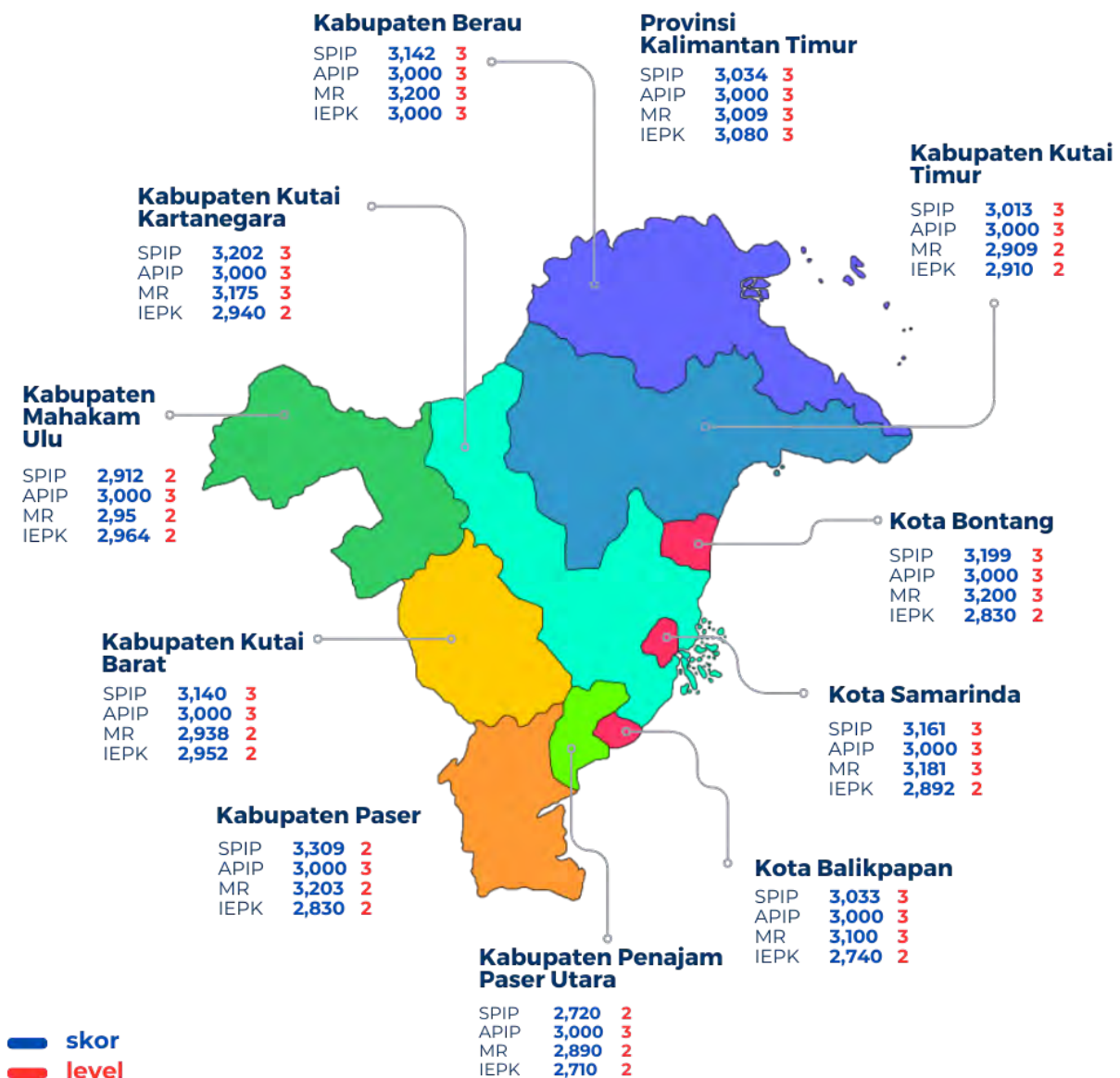
No	Sasprog/Saskeg/IKU	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
V	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU					
5.1	Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	Provinsi	1	1	100,00%	●
5.2	Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	Kab/Kota	10	10	100,00%	●
5.3	Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	Provinsi	1	1	100,00%	●
5.4	Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	Kab/Kota	10	8	80,00%	●
5.5	Jumlah Provinsi dengan MRI \geq Level 3	Provinsi	1	1	100,00%	●
5.6	Jumlah Kab/Kota dengan MRI \geq Level 3	Kab/Kota	5	6	120,00%	●



No	Sasprog/Saskeg/IKU	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
5.7	Jumlah Pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	Jumlah	7	1	14,29%	●
5.8	Jumlah Desa yang pengelolaan keuangannya akuntabel	Desa	25	76	304,00%	●
5.9	Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai	Desa	25	30	120,00%	●
5.10	Jumlah BUMD dengan MRI \geq Level 3	BUMD	3	3	100,00%	●
5.11	Jumlah BLUD dengan MRI \geq Level 3	BLUD	4	6	150,00%	●
5.12	Jumlah BUMD dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3	BUMD	2	2	100,00%	●
5.13	Jumlah BLUD dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3	BLUD	1	1	100,00%	●
Capaian Rata-rata					114,48%	

Gambar 3.2

Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP Pada Pemerintah Provinsi/Kab/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Tiimur



Uraian masing-masing indikator kinerja sasaran kegiatan "Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU" adalah sebagai berikut.

a. IKK 5.1 : Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP > Level 3

Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP > Level 3 sebanyak 1 APIP

Kapabilitas Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah adalah kemampuan yang harus dimiliki APIP agar dapat melaksanakan tugas-tugas pengawasan secara efektif. BPKP mengembangkan model kapabilitas pengawasan intern mengacu kepada *Internal Audit Capability Model (IA-CM)*. Kapabilitas APIP dikelompokkan ke dalam lima tingkatan (level) yaitu *Initial* (level 1), *Infrastructure* (level 2), *Integrated* (level 3), *Managed* (level 4), dan *Optimizing* (level 5).

Setiap level kapabilitas terdiri atas satu atau beberapa area proses kunci (Key Process Area/KPA), dimana KPA ini terkait dengan enam elemen pengawasan intern yaitu Peran dan Layanan APIP, Pengelolaan SDM, Praktik Profesional, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, serta Struktur Tata Kelola.

Tingkat kapabilitas APIP disimpulkan dari hasil penilaian tingkat kapabilitas yang dilaksanakan oleh BPKP dan atau dilaksanakan sendiri oleh APIP K/L/Pemda menggunakan pedoman penilaian kapabilitas APIP yang dikembangkan oleh BPKP dengan *quality assurance* dari BPKP.

Indikator kinerja diukur dari jumlah APIP Provinsi dengan kapabilitas \geq level 3 dan jumlah APIP kabupaten/kota dengan kapabilitas \geq level 3.

Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP > Level 3 sampai dengan tahun 2023 yaitu sebanyak 1 APIP, mencapai 100% dari target tahun 2023 sebanyak 1 APIP.

Jumlah APIP Provinsi dengan kapabilitas APIP \geq level 3 pada Tahun 2023 sebanyak 1 APIP tetap 100,00% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebanyak 1 APIP. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra 2024 sebanyak 1 APIP realisasi Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq level 3 mencapai 100%.

Nilai realisasi indikator kinerja di atas diperoleh atas hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bidang Pengawasan P3A sesuai PKPT APP yaitu Sektor Penguatan Penyelenggaraan Pemerintah yang Baik dan Bersih yaitu Kapabilitas APIP

Aktivitas-aktivitas pengawasan penting yang mendukung pencapaian target "Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP > Level 3" yaitu Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.



Faktor Pendukung/Penghambat Pencapaian Kinerja

Tercapainya target kinerja jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3 didorong dengan adanya komitmen dari APIP Provinsi dalam memberdayakan APIP serta urgensi penerapan manajemen risiko di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Rencana Tindak

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur akan melakukan monitoring tindak lanjut *Area of Improvement* hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Provinsi Kalimantan Timur.

b. IKK 5.2 : Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP $>$ Level 3

*Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP $>$ Level 3 sebanyak **10 APIP***

Tingkat kapabilitas APIP disimpulkan dari hasil penilaian tingkat kapabilitas yang dilaksanakan oleh BPKP dan atau dilaksanakan sendiri oleh APIP K/L/Pemda menggunakan pedoman penilaian kapabilitas APIP yang dikembangkan oleh BPKP dengan *quality assurance* dari BPKP.

Indikator kinerja diukur dari jumlah APIP Provinsi dengan kapabilitas \geq level 3 dan jumlah APIP kabupaten/kota dengan kapabilitas \geq level 3.

Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP $>$ Level 3 sampai dengan tahun 2023 yaitu sebanyak 10 APIP, mencapai 100% dari target tahun 2023 sebanyak 10 APIP.

Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3 pada Tahun 2023 sebanyak 10 APIP naik 42,86% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebanyak 7 APIP. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra 2024 sebanyak 10 APIP realisasi Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP \geq level 3 mencapai 100%.

Nilai realisasi indikator kinerja di atas diperoleh atas hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bidang Pengawasan P3A sesuai PKPT APP yaitu Sektor Penguatan Penyelenggaraan Pemerintah yang Baik dan Bersih, Tema Penguatan Tata Kelola yaitu Kapabilitas APIP.

Aktivitas-aktivitas pengawasan penting yang mendukung pencapaian target "Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP $>$ Level 3" antara lain sebagai berikut:

- a. Bimbingan Teknis Penyusunan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR), Evaluasi Risk Register, Audit Kinerja pada Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara
- b. Pendampingan Penyusunan PPBR Tahun 2023 pada Inspektorat Kabupaten Kutai Timur
- c. *Focus Group Discussion* (FGD) Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Mahakam Ulu
- d. *Coaching Clinic* Pelaksanaan Audit Kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2022



- e. *Focus Group Discussion* (FGD) Audit Ketaatan Tahun Anggaran 2022 dan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Tahun 2023 dengan Inspektorat Kabupaten Kutai Timur
- f. Workshop Audit Kinerja untuk seluruh APIP di Lingkungan Inspektorat Kota Bontang
- g. Memfasilitasi kegiatan pendampingan percepatan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Pada Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023
- h. Fasilitasi Kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) dan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP di Lingkungan Inspektorat Daerah Kota Bontang
- i. Dukungan Fasilitasi Kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) dan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP di Lingkungan Inspektorat Daerah Kota Bontang
- j. Monitoring Penyelesaian Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara
- k. Narasumber Kegiatan *Coaching Clinic* Peningkatan Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kota Balikpapan
- l. Narasumber Peningkatan Kapabilitas APIP pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur
- m. *Coaching Clinic* Audit Kinerja pada Inspektorat Kabupaten Kutai Barat
- n. Evaluasi Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Timur
- o. Koordinasi Pemenuhan Dokumen Kapabilitas APIP Dalam Rangka Perolehan Level 3 pada Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara, Inspektorat Kutai Timur, dan Inspektorat Mahakam Ulu

Faktor Pendukung/Penghambat Pencapaian Kinerja

1. Adanya komitmen kepala daerah dalam memberdayakan APIP serta urgensi penerapan manajemen risiko di pemerintah daerah
2. Pembinaan dan komunikasi yang dilakukan secara intensif kepada APIP yang masih Level 2

Rencana Tindak

1. Sinergi serta kolaborasi dengan Inspektorat Pemerintah Daerah akan ditingkatkan lebih intens.
2. Memonitoring tindak lanjut Aol dari hasil evaluasi, terutama pada APIP yang baru mencapai Level 3 yaitu Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara, Inspektorat Kabupaten Mahakam Ulu, dan Inspektorat Kabupaten Kutai Timur.

c. IKK 5.3 : Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP > Level 3

Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP > Level 3 sebanyak 1 Pemda Maturitas SPIP K/L/Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Level 3 merupakan tingkat maturitas SPIP yang diharapkan dicapai oleh K/L/Pemda. Pada level 3 atau tingkat "terdefinisi".

Tingkat maturitas SPIP merupakan kerangka kerja yang menunjukkan karakteristik dasar kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan serta dapat digunakan sebagai instrumen evaluatif dan panduan generik peningkatan efektivitas SPIP. Semakin tinggi level maturitas penyelenggaraan SPIP pada K/L/Pemda, diharapkan akan semakin baik kualitas pencapaian tujuan instansi pemerintah dan semakin berkualitas birokrasi.



Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP > Level 3 sampai dengan tahun 2023 yaitu sebanyak 1 Pemda, mencapai 100% dari target tahun 2023 sebanyak 1 Pemda.

Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP \geq Level 3 pada Tahun 2023 sebanyak 1 Pemda tetap jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebanyak 1 Pemda. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra 2024 sebanyak 1 Pemda realisasi Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP \geq level 3 mencapai 100%.

Nilai realisasi indikator kinerja di atas diperoleh atas hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bidang Pengawasan Akuntabilitas Pemerintah Daerah sesuai PKPT APP Sektor Penguatan Penyelenggaraan Pemerintah yang Baik dan Bersih yaitu Maturitas SPIP/MRI - Pemerintah Daerah

Aktivitas-aktivitas pengawasan penting yang mendukung pencapaian target "Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP > Level 3" antara lain sebagai berikut:

- a. Monitoring Pelaksanaan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Provinsi Kalimantan Timur.
- b. Workshop Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2023.
- c. Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Provinsi Kalimantan Timur.

Faktor Pendukung/Penghambat Pencapaian Kinerja

1. Telah dilakukan asistensi dan bimbingan teknis penerapan SPIP serta pendampingan dan monitoring pelaksanaan penilaian mandiri dan penjaminan kualitas (PMPK).
2. Menjalin hubungan baik dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan berkoordinasi dengan lebih intens untuk melakukan pembinaan maturitas penyelenggaraan SPIP.

Rencana Tindak

1. Memberikan sosialisasi kepada asesor pemda dan asesor OPD di lingkungan pemda-pemda yang belum pernah melaksanakan Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi agar sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tetap terjaga.
2. Memberikan sosialisasi dan bimbingan teknik mengenai penyelenggaraan SPIP pada perangkat daerah.
3. Memberikan pendampingan/monitoring pelaksanaan PM dan PK SPIP Terintegrasi pada pemda-pemda.

c. IKK 5.4 : Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP > Level 3

<i>Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP > Level 3 sebanyak 8 Pemda</i>	Tingkat maturitas SPIP merupakan kerangka kerja yang menunjukkan karakteristik dasar kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan serta dapat digunakan sebagai instrumen evaluatif dan panduan generik peningkatan efektivitas SPIP. Semakin tinggi level maturitas penyelenggaraan SPIP pada K/L/Pemda, diharapkan
--	--



akan semakin baik kualitas pencapaian tujuan instansi pemerintah dan semakin berkualitas birokrasi.

Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP > Level 3 sampai dengan tahun 2023 yaitu sebanyak 8 Pemda, mencapai 80% dari target tahun 2023 sebanyak 10 Pemda.

Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq Level 3 pada Tahun 2023 sebanyak 8 Pemda tetap dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebanyak 8 Pemda. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra 2024 sebanyak 10 Pemda realisasi Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP \geq level 3 mencapai 80%.

Nilai realisasi indikator kinerja di atas diperoleh atas hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bidang Pengawasan Akuntabilitas Pemerintah Daerah sesuai PKPT APP Sektor Penguatan Penyelenggaraan Pemerintah yang Baik dan Bersih yaitu Maturitas SPIP/MRI - Pemerintah Daerah

Aktivitas-aktivitas pengawasan penting yang mendukung pencapaian target "Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP > Level 3" antara lain sebagai berikut:

- a. Monitoring Pelaksanaan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Pada Kabupaten Paser
- b. Monitoring Pelaksanaan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kabupaten Penajam Paser Utara
- c. Monitoring Pelaksanaan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Berau
- d. Monitoring Pelaksanaan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kabupaten Mahakam Ulu
- e. Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kabupaten Mahakam Ulu
- f. Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kabupaten Kutai Timur
- g. Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kabupaten Berau
- h. Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kabupaten Kutai Barat
- i. Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kabupaten Paser
- j. Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kabupaten Penajam Paser Utara
- k. Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kota Samarinda
- l. Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kota Balikpapan
- m. Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kabupaten Kutai Kartanegara



- n. Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kota Bontang
- o. Workshop Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi dan Register Risiko pada Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023
- p. Workshop Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2023
- q. Tindak Lanjut Hasil Ekspose Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Pemda Kalimantan Timur Tahun 2023

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja

1. Pemda Kabupaten Mahakam Ulu sebagai target capaian SPIP tahun 2023 tidak tercapai karena berdasarkan hasil ekspos pusat terdapat penurunan skor pada penetapan tujuan komponen kualitas perencanaan dari 3 menjadi 2 dan pada pencapaian tujuan komponen efektivitas dan efisiensi dari 4 menjadi 3. Hal ini disebabkan terdapat beberapa kegiatan yang berpotensi tidak efektif setelah disandingkan dengan hasil evran.
2. Pemda Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai target capaian SPIP tahun 2023 tidak dapat dimajukan ekspos pusat disebabkan penurunan skor pada pencapaian tujuan SPIP unsur pengamanan atas aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan mengalami penurunan skor masing-masing sebesar 1 sehingga skor berturut-turut menjadi 2 dan 1. Hal ini disebabkan opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WDP)
3. Hasil QA dari pusat atas hasil evaluasi pada Kabupaten Mahakam Ulu masih terdapat banyak catatan *area of improvement* (AOI) dan hasil LHP BPK Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2022 adalah WDP sehingga belum dapat memenuhi level 3 maturitas SPIP
4. Terdapat keterbatasan anggaran pembinaan dikarenakan lokasi yang cukup luas dan jarak tempuh yang cukup jauh membutuhkan anggaran pembiayaan yang memadai
5. Terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi dan sertifikasi yang dibutuhkan dalam melakukan pembinaan SPIP

Rencana Tindak

1. Mengoptimalkan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam berbagai kesempatan agar pemerintah daerah lebih berkomitmen dalam mencapai tingkat minimal maturitas SPIP.
2. Meningkatkan kompetensi SDM dengan melakukan Program Pelatihan Mandiri (PPM) mengenai SPIP secara rutin.
3. Memberikan pendampingan/monitoring pelaksanaan PM dan PK SPIP Terintegrasi pada pemda.

d. IKK 5.5 : Jumlah Provinsi dengan MRI \geq Level 3

Jumlah Provinsi dengan MRI \geq Level 3 sebanyak 1 Provinsi Manajemen Risiko Indeks (MRI) merupakan suatu model yang digunakan untuk mengukur kondisi karakteristik dasar dan tingkat kematangan pengelolaan risiko di suatu K/L/Pemda/BU. Model tersebut memadukan budaya, tata kelola, dan proses terkait manajemen risiko. Semakin tinggi manajemen risiko indeks, diharapkan semakin baik kualitas pengelolaan manajemen risiko dan pencapaian tujuan instansi pemerintah.



Pengukuran kualitas implementasi MR dilaksanakan dengan pendekatan maturity level, capability level, maupun maturity objectives. Ketiga pendekatan tersebut memberikan gambaran kualitas implementasi MR yang dilaksanakan oleh suatu organisasi, dengan melihat lima dimensi yaitu: struktur; budaya; proses; penggunaan aplikasi teknologi informasi, dan hasil.

Indeks penerapan manajemen risiko pemerintah daerah disimpulkan berdasarkan penilaian atas 8 komponen/area, mulai dari (i) Kualitas Perencanaan, (ii) Kepemimpinan, (iii) Kebijakan dan Strategi Manajemen Risiko, (iv) Sumber Daya Manusia, (v) Kemitraan, (vi) Proses Manajemen Risiko, (vii) Aktivitas Penanganan Risiko, dan (viii) Outcomes. Simpulan penilaian tersebut berupa angka indeks yang terdiri dari skala 1 s.d. 5.

Jumlah Provinsi dengan MRI > Level 3 sampai dengan tahun 2023 yaitu sebanyak 1 Pemda, mencapai 100% dari target tahun 2023 sebanyak 1 Pemda.

Jumlah Provinsi dengan MRI \geq Level 3 pada Tahun 2023 sebanyak 1 Pemda, tidak dapat dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 karena IKK ini baru ditargetkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra 2024 sebanyak 1 Pemda realisasi Jumlah Provinsi dengan MRI \geq level 3 mencapai 100%.

Nilai realisasi indikator kinerja di atas diperoleh atas hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bidang Pengawasan Akuntabilitas Pemerintah Daerah sesuai PKPT APP Sektor Penguatan Penyelenggaraan Pemerintah yang Baik dan Bersih yaitu Maturitas SPIP/MRI - Pemerintah Daerah

Aktivitas-aktivitas pengawasan penting yang mendukung pencapaian target "Jumlah Provinsi dengan MRI \geq Level 3" antara lain sebagai berikut:

- a. Monitoring Pelaksanaan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Provinsi Kalimantan Timur.
- b. Workshop Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2023.
- c. Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Provinsi Kalimantan Timur.

Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja

1. Mendorong implementasi Manajemen Risiko pada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam berbagai kesempatan/kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah ataupun kegiatan pengawasan.
2. Kepala Perwakilan proaktif melakukan koordinasi dengan kepala daerah di wilayah provinsi Kalimantan Timur mengenai peningkatan implementasi manajemen risiko bagi pemerintah daerah.

Rencana Tindak

1. Mendorong pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk segera menetapkan kebijakan pengelolaan risiko lengkap dengan struktur pengelola risiko.
2. Mengoptimalkan koordinasi dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam



berbagai kesempatan dan melalui media agar pemerintah daerah lebih berkomitmen dalam penerapan manajemen risiko untuk pencapaian tujuan organisasi.

e. IKK 5.6 : Jumlah Kabupaten/Kota dengan MRI \geq Level 3

Jumlah Kabupaten/Kota dengan MRI \geq Level 3 sebanyak 6 Pemda Indeks penerapan manajemen risiko pemerintah daerah disimpulkan berdasarkan penilaian atas 8 komponen/area, mulai dari (i) Kualitas Perencanaan, (ii) Kepemimpinan, (iii) Kebijakan dan Strategi Manajemen Risiko, (iv) Sumber Daya Manusia, (v) Kemitraan, (vi) Proses Manajemen Risiko, (vii) Aktivitas Penanganan Risiko, dan (viii) *Outcomes*. Simpulan penilaian tersebut berupa angka indeks yang terdiri dari skala 1 s.d. 5.

Jumlah Kabupaten/Kota dengan MRI $>$ Level 3 sampai dengan tahun 2023 yaitu sebanyak 6 Pemda, mencapai 120% dari target tahun 2023 sebanyak 5 Pemda.

Jumlah Kab/Kota dengan MRI \geq Level 3 pada Tahun 2023 sebanyak 6 Pemda, naik 100% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebanyak 3 Pemda. Sedangkan karena IKK ini baru ditargetkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra 2024 sebanyak 7 Pemda realisasi Jumlah Provinsi dengan MRI \geq level 3 mencapai 85,71%.

Nilai realisasi indikator kinerja di atas diperoleh atas hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bidang Pengawasan Akuntabilitas Pemerintah Daerah sesuai PKPT APP Sektor Penguatan Penyelenggaraan Pemerintah yang Baik dan Bersih yaitu Maturitas SPIP/MRI - Pemerintah Daerah

Aktivitas-aktivitas pengawasan penting yang mendukung pencapaian target "Jumlah Kabupaten/Kota dengan MRI \geq Level 3" antara lain sebagai berikut:

- a. Monitoring Pelaksanaan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur
- b. Workshop Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2023.

Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja

1. Mendorong implementasi Manajemen Risiko pada pemerintah daerah dalam berbagai kesempatan/kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah ataupun kegiatan pengawasan.
2. Kepala Perwakilan dan Bidang APD melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait Manajemen Risiko pada Pemerintah Daerah se-Provinsi Kalimantan Timur.

Rencana Tindak

1. Mendorong seluruh pemerintah daerah untuk segera menetapkan kebijakan pengelolaan risiko lengkap dengan struktur pengelola risiko.
2. Mengoptimalkan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam berbagai kesempatan dan melalui media agar pemerintah daerah lebih berkomitmen dalam penerapan manajemen risiko untuk pencapaian tujuan organisasi.
3. Memberikan pendampingan/monitoring PM dan PK SPIP Terintegrasi yang termasuk MRI pada pemda-pemda.



f. IKK 5.7 : Jumlah Pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah

Jumlah Pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah sebesar 1 Pemda. Jumlah Pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah diukur dengan menghitung jumlah pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja, yang ditunjukkan dengan indikator memiliki opini WTP dan SAKIP nilai BB.

Jumlah Pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah sampai dengan tahun 2023 yaitu sebanyak 1 Pemda yaitu Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, mencapai 14,29% dari target tahun 2023 sebanyak 7 Pemda.

Jumlah Pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah pada Tahun 2023 sebanyak 1 Pemda tetap dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebanyak 1 Pemda dan tidak dapat dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra 2024 karena IKK ini tidak ditargetkan dalam Renstra 2020-2024.

Nilai realisasi indikator kinerja di atas diperoleh atas hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bidang Pengawasan Akuntabilitas Pemerintah Daerah sesuai PKPT APP Sektor Pengawasan Non Prioritas yaitu Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Daerah (SAKIP), Peningkatan Kualitas Opini LKPD, dan Bimtek Implementasi FMIS pada Pemda.

Aktivitas-aktivitas pengawasan penting yang mendukung pencapaian target "Jumlah Pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan kinerja" antara lain sebagai berikut:

- a. Peningkatan Kualitas Opini LKPD
Penyusunan Rencana Aksi Peningkatan Kualitas Opini LKPD pada Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023
- b. Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Daerah (SAKIP)
Bimbingan Teknis Peningkatan Akuntabilitas Kinerja pada Pemerintah Kabupaten Paser

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja

1. BPKP tidak memiliki kewenangan dalam mengintervensi dan memonitor SAKIP Pemda.
2. Ketersediaan sumber daya manusia yang terbatas dan diprioritaskan dalam pelaksanaan APP triwulan III.

Rencana Tindak

1. Melanjutkan kerja sama yang baik dengan pemerintah daerah dalam hal peningkatan kualitas opini LKPD dan SAKIP.
2. Mendorong komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan rencana aksi untuk menindaklanjuti rekomendasi dari BPK.

g. IKK 5.8 : Jumlah Desa yang pengelolaannya akuntabel

Jumlah Desa yang pengelolaannya akuntabel 76 Desa Jumlah Desa yang pengelolaannya akuntabel diukur dengan menghitung jumlah desa di wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang telah melaksanakan pengelolaan keuangan yang akuntabel.



Jumlah Desa yang pengelolaan keuangannya akuntabel sampai dengan tahun 2023 yaitu sebanyak 76 Desa, mencapai 304% dari target tahun 2023 sebanyak 25 Desa.

Jumlah Desa yang pengelolaan keuangannya akuntabel pada Tahun 2023 sebanyak 76 Desa, naik 304% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebanyak 20 Desa, dan tidak dapat dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra 2024 karena IKK ini tidak ditargetkan dalam Renstra Perwakilan BPKP Kalimantan Timur 2020-2024.

Nilai realisasi indikator kinerja di atas diperoleh atas hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bidang Pengawasan Akuntabilitas Pemerintah Daerah sesuai PKPT APP Sektor Akuntabilitas Keuangan Negara, Daerah, dan Desa yaitu Akuntabilitas Keuangan Desa

Aktivitas-aktivitas pengawasan penting yang mendukung pencapaian target "Jumlah Desa yang pengelolaan keuangannya akuntabel" antara lain sebagai berikut:

- a. Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Desa Triwulan I Tahun 2023 pada Kabupaten Berau
- b. Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Desa Triwulan I, II, III, IV Tahun 2023 pada Kabupaten Kutai Timur
- c. Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Desa Triwulan II, IV Tahun 2023 pada Kabupaten Kutai Kartanegara
- d. Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Desa Triwulan III Tahun 2023 pada Kabupaten Penajam Paser Utara

Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja

1. Terdapat Program Pelatihan Mandiri (PPM) mengenai Akuntabilitas Keuangan Desa untuk penyamaan persepsi sebelum penugasan dimulai.
2. Pendampingan oleh DPMD Kabupaten pada saat pelaksanaan pengawasan akuntabilitas keuangan desa.

Rencana Tindak

1. Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah agar lebih berkomitmen dalam memberikan pemahaman kepada perangkat desa mengenai penginputan data pada aplikasi Sistem Keuangan Desa.
2. Melakukan bimbingan teknis/sosialisasi kepada pemerintah desa dalam hal peningkatan akuntabilitas keuangan desa.

h. IKK 5.9 : Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai

Jumlah Desa yang Menerapkan Pengelolaan Aset Desa Secara Memadai
30 Desa

IKK Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai diukur dengan menghitung jumlah desa yang telah menerapkan pengelolaan aset desa sesuai ketentuan, yaitu sejauh mana pemerintah desa telah menerapkan pengelolaan aset desa sesuai ketentuan.



Jumlah Desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai pada tahun 2023 yaitu sebanyak 30 Desa, mencapai 120% dari target tahun 2023 sebanyak 25 Desa.

Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai sampai dengan Tahun 2023 sebanyak Desa, naik 25% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebanyak 24 Desa. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra 2024 sebanyak 166 Desa, jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai sampai dengan tahun 2023 mencapai 145 desa atau 87,35%.

Nilai realisasi indikator kinerja di atas diperoleh atas hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bidang Pengawasan Akuntabilitas Pemerintah Daerah sesuai PKPT APP Sektor Akuntabilitas Keuangan Negara, Daerah, dan Desa yaitu Akuntabilitas Aset Desa.

Aktivitas-aktivitas pengawasan penting yang mendukung pencapaian target "Jumlah Desa yang Menerapkan Pengelolaan Aset Desa Secara Memadai" antara lain sebagai berikut:

- a. Pengawasan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Aset Desa Kabupaten Kutai Kartanegara
- b. Pengawasan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Aset Desa Kabupaten Kutai Timur

Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja

1. Terdapat Program Pelatihan Mandiri (PPM) mengenai Akuntabilitas Keuangan Desa untuk penyamaan persepsi sebelum penugasan dimulai.
2. Pendampingan oleh DPMD Kabupaten pada saat pelaksanaan pengawasan tata kelola aset desa.

Rencana Tindak

1. Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah agar lebih berkomitmen dalam memberikan pemahaman kepada perangkat desa mengenai pengelolaan aset desa dan melakukan input data aset desa ke Aplikasi Sipades.
2. Melakukan bimbingan teknis/sosialisasi kepada pemerintah desa dalam hal peningkatan kualitas tata kelola aset desa.

j. IKK 5.10 : Jumlah BUMD dengan MRI \geq Level 3

Jumlah BUMD dengan MRI \geq Level 3 sebanyak
3 BUMD

Jumlah BUMD dengan MRI \geq Level 3 diukur dengan dilakukannya penilaian terhadap 11 aspek meliputi Aspek Integrasi, Aspek Perancangan Kerangka Kerja, Aspek Implementasi, Evaluasi dan Perbaikan Kerangka Kerja, Aspek Komunikasi dan Konsultasi, Aspek Lingkup, Konteks dan Kriteria, Aspek Identifikasi Risiko, Aspek Analisis Risiko, Aspek Evaluasi Risiko, Aspek Perlakuan Risiko, dan Aspek Monitoring dan Reviu.



Jumlah BUMD dengan MRI \geq Level 3 sampai dengan tahun 2023 yaitu sebanyak 3 BUMD, mencapai 100% dari target tahun 2023 sebanyak 3 BUMD.

Jumlah BUMD dengan MRI \geq Level 3 pada Tahun 2023 sebanyak 3 BUMD, naik 200% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebanyak 1 BUMD. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra 2024 sebanyak 3 BUMD, Jumlah BUMD dengan MRI \geq Level 3 mencapai 100%.

Nilai realisasi indikator kinerja di atas diperoleh atas hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bidang Pengawasan Akuntan Negara sesuai PKPT dalam APP Sektor Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih yaitu Pengawasan atas Manajemen Risiko Badan Usaha dan Badan Layanan

Aktivitas-aktivitas pengawasan penting di tahun 2023 yang mendukung pencapaian target "Jumlah BUMD dengan MRI \geq Level 3" antara lain sebagai berikut:

- a. Bimbingan Teknis Penyusunan Infrastruktur Penerapan Manajemen Risiko pada Perumda Tirta Manuntung Kota Balikpapan;
- b. Bimbingan Teknis Penerapan Manajemen Risiko pada Perumda Air Minum Tirta Buah Benua Kutai Timur;
- c. Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko pada Perumda Air Minum Tirta Buah Benua Kutai Timur;
- d. Monitoring Penerapan Manajemen Risiko pada PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur Tahun 2023; dan
- e. Bimbingan Teknis Penerapan Manajemen Risiko pada PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur Tahun 2023;
- f. Evaluasi Manajemen Risiko pada PT Migas Mandiri Pratama Tahun 2023.

Faktor Pendukung/Penghambat Pencapaian Kinerja

Terdapat beberapa kendala yang menyebabkan belum tercapainya BUMD dengan MRI \geq Level 3 diantaranya:

- 1) BUMD belum memiliki kesadaran yang utuh dan komitmen dalam membangun Manajemen Risiko;
- 2) BUMD belum sepenuhnya memiliki infrastruktur dalam pemenuhan aspek penilaian manajemen risiko pada BUMD.

Rencana Tindak

Dalam rangka meningkatkan kinerja, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur akan melakukan:

- 1) Pendampingan terhadap pemenuhan aspek-aspek penilaian manajemen risiko pada BUMD target/lokus
- 2) Optimalisasi manajemen sumber daya dan waktu penugasan yang efektif.



k. IKK 5.11 : Jumlah BLU/D dengan MRI \geq Level 3

Jumlah BLU/D dengan MRI \geq Level 3 sebanyak 6 BLU/D Jumlah BLU/D dengan MRI \geq Level 3 diukur dengan dilakukannya penilaian terhadap 3 aspek meliputi Aspek Perencanaan, Aspek Kapabilitas, dan Aspek Hasil.

Jumlah BLU/D dengan MRI \geq Level 3 sampai dengan tahun 2023 yaitu sebanyak 6 BLU/D, mencapai 150% dari target tahun 2023 sebanyak 4 BLU/D.

Jumlah BLUD dengan MRI \geq Level 3 pada Tahun 2023 sebanyak 6 BLUD, naik 300% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebanyak 2 BLUD. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra 2024 sebanyak 5 BLUD, Jumlah BLUD dengan MRI \geq Level 3 mencapai 120%.

Nilai realisasi indikator kinerja di atas diperoleh atas hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bidang Pengawasan Akuntan Negara sesuai PKPT dalam APP Sektor Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih yaitu Pengawasan atas Manajemen Risiko Badan Usaha dan Badan Layanan.

Aktivitas-aktivitas pengawasan penting di tahun 2023 yang mendukung pencapaian target "Jumlah BLU/D dengan MRI \geq Level 3" antara lain sebagai berikut:

- a. Evaluasi Tingkat Maturitas Penerapan Manajemen Risiko BLUD pada RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo;
- b. Evaluasi Tingkat Maturitas Penerapan Manajemen Risiko BLUD pada RSUD Ratu Aji Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2023;
- c. Evaluasi Tingkat Maturitas Penerapan Manajemen Risiko BLUD pada RSUD Beriman Balikpapan Tahun 2023;
- d. Evaluasi Tingkat Maturitas Penerapan Manajemen Risiko BLUD pada RSUD Taman Husada Bontang Tahun 2023.

Faktor Pendukung/Penghambat Pencapaian Kinerja

Tercapainya target kinerja BLUD dengan MRI \geq Level 3 didorong dengan adanya beberapa faktor pendukung yaitu:

- 1) Adanya komitmen dari BLUD untuk menerapkan pengelolaan risiko;
- 2) Kondisi Manajemen risiko pada BLUD yang memadai.

Rencana Tindak

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur salah satunya akan melakukan monitoring tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan.

l. IKK 5.12 : Jumlah BUMD dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3

Jumlah BUMD dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3 sebanyak 2 BUMD Jumlah BUMD dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3 diukur dengan Jumlah BUMD yang berada pada kapabilitas SPI \geq Level 3



Jumlah BUMD dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3 sampai dengan tahun 2023 yaitu sebanyak 2 BUMD, mencapai 100% dari target tahun 2023 sebanyak 2 BUMD.

Jumlah BUMD dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3 pada Tahun 2023 sebanyak 2 BUMD, tidak dapat dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 karena tidak menjadi bagian dari target. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra 2024 sebanyak 3 BUMD, Jumlah BUMD dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3 mencapai 66,67%.

Nilai realisasi indikator kinerja di atas diperoleh atas hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bidang Pengawasan Akuntan Negara sesuai PKPT dalam APP Sektor Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih yaitu Pengawasan atas Manajemen Risiko Badan Usaha dan Badan Layanan

Aktivitas-aktivitas pengawasan penting di tahun 2023 yang mendukung pencapaian target "Jumlah BUMD dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3" antara lain sebagai berikut:

- a. Monitoring Kapabilitas Satuan Pengawasan Intern (SPI) pada Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda Tahun 2023;
- b. Monitoring Tingkat Kapabilitas Satuan Pengawasan Intern (SPI) pada Perumdam Batiwakkal Kabupaten Berau;
- c. Bimbingan Teknis Pemenuhan Elemen Kapabilitas Satuan Pengawasan Intern (SPI) pada Perumdam Batiwakkal Kabupaten Berau Tahun 2023;
- d. Bimbingan Teknis Pemenuhan Elemen Kapabilitas Satuan Pengawasan Intern (SPI) pada Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda Tahun 2023;
- e. *Coaching Clinic* atas Pemenuhan Elemen Penilaian Kapabilitas SPI pada Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda Tahun 2023;
- f. Evaluasi Tingkat Kapabilitas Satuan Pengawasan Intern (SPI) pada Perumdam Batiwakkal Kabupaten Berau Tahun 2023;
- g. Evaluasi Tingkat Kapabilitas SPI pada Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda Tahun 2023;
- h. Evaluasi Tingkat Kapabilitas Satuan Pengawasan Intern (SPI) pada Perumdam Batiwakkal Kabupaten Berau Tahun 2023 (Pemenuhan Renaksi Level 3);
- i. Evaluasi Tingkat Kapabilitas SPI pada Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda Tahun 2023 (Pemenuhan Renaksi Level 3).

Faktor Pendukung/Penghambat Pencapaian Kinerja

Terdapat beberapa faktor pendukung pencapaian target kinerja tersebut diantaranya:

- 1) Adanya komitmen dari BUMD untuk membangun Kapabilitas SPI
- 2) Pendampingan tim BPKP yang cukup intensif

Rencana Tindak

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur akan melakukan:

- 1) Pendampingan kepada BUMD dalam rangka pemenuhan atas Area of Improvement/Aoi dari Kapabilitas SPI level 3;
- 2) Desk Review atas Area of Improvement (Aoi) dari Kapabilitas SPI level 3.
- 3) Melakukan pendampingan secara intens pada BUMD yang menjadi target tahun 2024.

m. IKK 5.13 : Jumlah BLU/D dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3

Jumlah BLU/D dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3 sebanyak 1 BLU/D

Jumlah BLU/D dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3 diukur dengan Jumlah BLU/D yang berada pada kapabilitas SPI \geq Level 3

Jumlah BLU/D dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3 sampai dengan tahun 2023 yaitu sebanyak 1 BLU/D, mencapai 100% dari target tahun 2023 sebanyak 1 BLU/D.

Jumlah BLUD dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3 pada Tahun 2023 sebanyak 1 BLUD, tidak dapat dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 karena tidak menjadi bagian dari target. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra 2024 sebanyak 1 BLUD, Jumlah BLUD dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3 telah mencapai 100%.

Nilai realisasi indikator kinerja di atas diperoleh atas hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bidang Pengawasan Akuntan Negara sesuai PKPT dalam APP Sektor Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih yaitu Pengawasan atas Manajemen Risiko Badan Usaha dan Badan Layanan

Aktivitas-aktivitas pengawasan penting yang mendukung pencapaian target "Jumlah BLU/D dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3" antara lain sebagai berikut:

- a. Bimbingan Teknis Penerapan Kapabilitas Satuan Pengawasan Intern (SPI) pada RSUD Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
- b. Evaluasi Tingkat Kapabilitas SPI pada RSUD Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara;
- c. Evaluasi Tingkat Kapabilitas SPI pada RSUD Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemenuhan Renaksi Level 3).

Faktor Pendukung/Penghambat Pencapaian Kinerja

Terdapat beberapa faktor pendukung pencapaian target kinerja tersebut diantaranya:

- 1) Adanya komitmen dari BLUD untuk membangun Kapabilitas SPI
- 2) Pendampingan tim BPKP yang cukup intensif

Rencana Tindak

Untuk meningkatkan kinerja, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur akan melakukan:

- 1) Pendampingan kepada BLUD yang menjadi target di tahun 2024 dalam rangka peningkatan kapabilitas SPI \geq Level 3;
- 2) Evaluasi Tingkat Kapabilitas SPI pada BLUD.



Risiko inherent sesuai aplikasi RMIS yang terdapat pada sastra 5 “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU” antara lain sebagai berikut:

1. Anggaran pengawasan (*assurance* dan *consulting*) belum sesuai kebutuhan
2. Hasil Kegiatan *Consulting* (Bimbingan Teknis, Asistensi, dan Sosialisasi) tidak dapat ditindaklanjuti
3. Kualitas Kegiatan *Consulting* (Bimbingan Teknis, Asistensi, dan Sosialisasi) kurang optimal
4. Laporan hasil pengawasan (kegiatan *assurance*) tidak didukung kertas kerja yang lengkap dan valid
5. Auditor tidak berhasil memberikan rekomendasi atas kelemahan yang ditemukan dalam penugasan *Assurance* (Audit, Reviu, Evaluasi, dan Pemantauan)
6. Penyusunan laporan internal (bulanan/triwulanan) tidak tepat waktu
7. Hasil Kegiatan *Consulting* (Bimbingan Teknis, Asistensi, dan Sosialisasi) tidak diimplementasikan oleh mitra kerja (*stakeholder*)
8. Auditan tidak mau melanjutkan tahapan penugasan (FCP, SPIP, MR, dsb) ke tahap berikutnya

Atas Risiko tersebut pengendalian yang ada sudah memadai sehingga tidak terdapat risiko residual.

Sasaran Kegiatan 6 : Meningkatkan Tata Kelola Unit Kerja

Rata-rata capaian kinerja “Sasaran Kegiatan 6: Meningkatkan Tata Kelola Unit Kerja” tahun 2023 adalah 117,18% Capaian sasaran kegiatan ini diukur dengan menggunakan 7 (tujuh) indikator kinerja, yaitu:

1. Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja
2. Nilai SAKIP Unit Kerja
3. Persentase Efektivitas Pengendalian Intern (SPIP Unit Kerja)
4. Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja)
5. Indeks Kualitas Layanan Eksternal Unit Kerja
6. Skor IKPA Unit Kerja
7. Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja

Capaian masing-masing indikator kinerja disajikan pada Tabel 3.15

Tabel 3.15
Target dan Realisasi Sasaran Kegiatan 6

No	Sasprog/Saskeg/IKU	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Notifikasi
VI Meningkatkan Tata Kelola Unit Kerja						
6.1	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor Skala 100	75	85,94	114,59%	●
6.2	Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor Skala 100	82	83,55	101,89%	●
6.3	Persentase Efektivitas Pengendalian Intern (SPIP Unit Kerja)	(%) Persen	70	100	142,86%	●
6.4	Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja)	(%) Persen	100	100	100,00%	●
6.5	Indeks Kualitas Layanan Eksternal Unit Kerja	Indeks Skala 100	75	91,22	121,63%	●
6.6	Skor IKPA Unit Kerja	Indeks Skala 100	95	99,99	105,25%	●
6.7	Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja	Indeks Skala 100	80	107,24	134,05%	●
Capaian Rata-rata					117,18%	



Uraian kinerja atas 7 (tujuh) indikator kinerja sasaran kegiatan “Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja” diuraikan sebagai berikut:

a. IKK 6.1 : Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja

Nilai skor Zona

Integritas Unit Kerja

85,94

Zona Integritas (ZI) merupakan sebutan atau predikat yang diberikan oleh Kementerian PAN dan RB kepada K/L/Pemda yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Nilai skor zona integritas unit kerja diperoleh dari hasil evaluasi oleh Inspektorat BPKP atas pelaksanaan pembangunan WBK pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Pada tahun 2023, nilai skor zona integritas Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur terealisasi sebesar 85,94 atau mencapai 114,59% dari target tahun 2023 sebesar 75.

Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja pada Tahun 2023 sebesar 85,94 naik 12,65% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 76,29. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra 2024 sebesar 79, realisasi IKK ini mencapai 108,78%.

Faktor Pendukung/Penghambat Pencapaian Kinerja

- 1) Dukungan dan komitmen seluruh pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur dalam pembangunan Zona Integritas Menuju WBK
- 2) Kerja sama dan sinergi berbagai pihak, baik dari Kantor Pusat BPKP sebagai pembina dan mitra kerja di wilayah Provinsi Kalimantan Timur untuk mendukung pembangunan Zona Integritas Menuju WBK.

Rencana Tindak

- 1) Meningkatkan integritas dan kualitas layanan publik dengan melaksanakan seluruh 6 komponen pengungkit pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan membuat berbagai inovasi untuk meningkatkan pelayanan.
- 2) Menindaklanjuti rekomendasi dan *Area of Improvement* pada hasil evaluasi inspektorat untuk pembangunan Zona Integritas Tahun 2024

b. IKK 6.2 : Nilai SAKIP Unit Kerja

Nilai SAKIP Unit Kerja

83,55

Indikator kinerja nilai SAKIP diperoleh dari nilai implementasi SAKIP melalui sistem penilaian mandiri dan evaluasi dari Inspektorat BPKP atas hasil penilaian mandiri tersebut yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi



Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan BPKP Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan BPKP.

Pada tahun 2023, nilai SAKIP Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur terealisasi sebesar 83,55 atau mencapai 101,89% dari target sebesar 82. Nilai ini merupakan hasil penilaian setelah dilakukan evaluasi oleh Inspektorat atas penilaian mandiri tahun 2023.

Nilai SAKIP Unit Kerja pada Tahun 2023 sebesar 83,55 turun 3,41% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 86,50. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra 2024 sebesar 84, realisasi IKK ini mencapai 99,46%.

Faktor Pendukung/Penghambat Pencapaian Kinerja

Komitmen pimpinan dan seluruh dukungan pegawai di Perwakilan BPKP Kalimantan Timur mempunyai peran penting dalam pencapaian kinerja nilai SAKIP Unit Kerja.

Rencana Tindak

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur akan menindaklanjuti saran dari Inspektorat BPKP yaitu:

- 1) Berkoordinasi dengan Biro Manajemen Kinerja, Organisasi dan Tata Kelola untuk menetapkan target tahun berikutnya dengan memperhatikan capaian tahun sebelumnya;
- 2) Menyelaraskan definisi atau rumus pengukuran IKK pada dokumen laporan kinerja dan profil indikator di aplikasi E-sakip;
- 3) Memperhatikan sistematika dan penyajian LKj berikutnya sesuai Surat Edaran Sekretaris Utama Tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Kinerja Tahunan (LKj) di Lingkungan BPKP *ter-update*;

c. IKK 6.3 : Persentase Efektivitas Pengendalian Intern (SPIP Unit Kerja)

Persentase Efektivitas Pengendalian Intern sebesar 100%

Persentase Efektivitas Pengendalian Intern diukur dari jumlah pengendalian intern yang berhasil menurunkan risiko ke bawah selera risiko dibandingkan dengan jumlah seluruh pengendalian intern yang ada (risiko teridentifikasi yang telah termitigasi) pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur yang dapat dilihat dalam aplikasi RMIS.

Pada tahun 2023, Persentase Efektivitas Pengendalian Intern Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur terealisasi sebesar 100 atau mencapai 142,86% dari target tahun 2023 sebesar 70%

Persentase Efektivitas Pengendalian Intern (SPIP Unit Kerja) pada Tahun 2023 sebesar 100% naik 26,92% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 78,79 dan tidak dapat dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra 2024 karena tidak ditargetkan dalam Renstra 2020-2024.



Faktor Pendukung/Penghambat Pencapaian Kinerja

Faktor pendukung yang membuat kinerja mencapai 100% karena seluruh pengendalian intern yang ada pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur telah berhasil dimitigasi dan ditindaklanjuti melalui penyelesaian tindak lanjut dari RTP Tahun 2023, sehingga pengendalian intern yang diterapkan telah berhasil menurunkan risiko berada ke bawah selera risiko

Rencana Tindak

Untuk mendukung agar capaian tetap dapat mencapai 100%, maka strategi yang telah ada dan digunakan pada tahun 2023 dalam mengelola risiko tetap diterapkan serta monitoring dan evaluasi akan diintensifkan per triwulan sebagai bentuk pengendalian dalam pencapaian target tahun 2024.

d. IKK 6.4: Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja)

Persentase Penyelesaian RTP Persentase Penyelesaian RTP diukur dengan menghitung jumlah RTP yang terealisasi sepanjang tahun 2023.
100%

Target kinerja ini pada tahun 2023 sebesar 100%

Pada tahun 2023, Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja) Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur terealisasi sebesar 100% atau mencapai 100% dari target tahun 2023.

Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja) pada Tahun 2023 sebesar 100% tetap dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 100% dan tidak dapat dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra 2024 karena tidak ditargetkan dalam Renstra 2020-2024.

Faktor Pendukung/Penghambat Pencapaian Kinerja

Dukungan dan komitmen seluruh pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur dalam merealisasikan rencana tindak lanjut.

Rencana Tindak

Memberikan PPM kepada pegawai Perwakilan BPKP Kalimantan Timur tentang manajemen risiko pada unit kerja sekaligus mempersiapkan pengelolaan risiko tahun 2024

e. IKK 6.5 : Indeks Kualitas Layanan Eksternal Unit Kerja

Indeks Kualitas Layanan Eksternal Unit Kerja Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja diukur dengan menghitung indeks kepuasan layanan unit kerja perwakilan.
91,22

Pada tahun 2023, Indeks Kepuasan Layanan Unit Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur terealisasi sebesar 91,22 atau mencapai 121,62% dari target tahun 2023 sebesar 75,00

Capaian Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja sebesar 91,22 dikoordinasikan oleh Bagian Umum yang berasal dari kegiatan survei pelayanan eksternal kepada stakeholders di Tahun 2023.

Indeks Kualitas Layanan Eksternal Unit Kerja pada Tahun 2023 sebesar 91,22 naik 0,16% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022



sebesar 91,07. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra 2024 sebesar 81, realisasi IKK ini mencapai 112,62%.

Faktor Pendukung/Penghambat Pencapaian Kinerja

Faktor pendukung yang mengakibatkan kinerja Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja maksimal, karena *stakeholders* yang memberikan penilaian dalam pengisian survei kepuasan layanan unit kerja telah mencapai target survei dari yang direncanakan, dimana *stakeholders* dalam mengisi survei memberikan penilaian positif dan harapan yang baik atas pelayanan unit kerja.

Rencana Tindak

Rencana tindak yang direncanakan adalah dengan tetap memberikan pelayanan yang maksimal dengan melalui peningkatan intensitas komunikasi dan koordinasi kepada *stakeholders*, yaitu didalam setiap kegiatan *coaching clinic* maupun bimtek dan sosialisasi akan diberikan permohonan *feedback* dari setiap hasil kegiatan, dengan harapan akan diketahui apakah pelayanan unit kerja kepada *stakeholders* telah dapat memenuhi harapan *stakeholders*.

f. IKK 6.6 : Skor IKPA Unit Kerja

Skor IKPA Unit Kerja
99,99

IKK ini diukur dengan menghitung Skor Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang diukur oleh Kementerian Keuangan.

Pada tahun 2023, skor IKPA Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur terealisasi sebesar 99,99 atau mencapai 105,25% dari target tahun 2023 sebesar 95,00. Capaian skor IKPA sebesar 99,99 dikoordinasikan oleh Bagian Tata Usaha dan diperoleh dari data IKPA pada aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan tahun 2023 (per November 2023).

Skor IKPA Unit Kerja pada Tahun 2023 sebesar 99.99 naik 3,92% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 96,22. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra 2024 sebesar 90, realisasi IKK ini telah mencapai 111,10%.

Faktor Pendukung/Penghambat Pencapaian Kinerja

Faktor pendukung tercapainya target IKPA tahun 2023:

1. Adanya dukungan yang kuat dari pimpinan untuk mendorong tercapainya pengelolaan keuangan yang profesional, termasuk pencapaian standar terbaik dalam kinerja pelaksanaan anggaran;
2. Sinergi yang baik dengan seluruh jajaran Korwas dan staf Bidang/Bagian, utamanya dalam pencapaian target output, mengoptimalkan penyerapan, dan meminimalisasi deviasi rencana penggunaan kas bulanan;
3. Kerjasama dan kemauan yang kuat dari jajaran Subbag Keuangan untuk mencapai kinerja pengelolaan keuangan yang terbaik;
4. Koordinasi yang baik dengan instansi Pembina, baik itu pembina eksternal yang menerbitkan indeks nilai IKPA yaitu DJPB, dalam hal ini Kanwil DJPB dan KPPN serta Biro Keuangan selaku pembina internal.



Rencana Tindak

Untuk mempertahankan pencapaian nilai IKPA yang telah melampaui target Perjanjian Kinerja (Perkin), maka Subbag Keuangan akan:

1. Menjaga sinergi yang baik dengan Bidang, utamanya Bidang P3A sebagai *leading sector* perencanaan, sehingga penetapan target *output* dan rencana kas dapat tersusun dengan akurat, serta Bidang-bidang teknis dalam hal pencapaian output dan penyerapan anggaran;
2. Senantiasa berkoordinasi secara intens dengan instansi Pembina eksternal dan internal, terkait regulasi maupun isu-isu terbaru dalam pelaksanaan anggaran;
3. Meningkatkan kompetensi Subbag Keuangan melalui pembelajaran secara *online* (e-learning) topik-topik terbaru mengenai pengelolaan keuangan, maupun *offline* (tatap muka) dengan menghadiri pelatihan-pelatihan ataupun forum-forum yang dilaksanakan oleh pembina eksternal maupun internal.

g. IKK 6.7 : Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja

<i>Nilai</i>	IKK ini diukur dengan menghitung pengelolaan BMN Baik sesuai ketentuan.
<i>Pengelolaan</i>	Pada tahun 2023, nilai pengelolaan BMN unit kerja terealisasi dengan nilai
<i>BMN Unit</i>	107,24 atau mencapai 134,05% dari target tahun 2023 sebesar 80. Capaian
<i>Kerja 107,24</i>	nilai indeks kinerja pengelolaan BMN Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur dilakukan melalui aplikasi https://enablers.bpkp.go.id/pbmn yang telah dilakukan validasi oleh Biro Umum dan Pengadaan/Jasa BPKP Pusat.

Capaian tersebut diperoleh dari delapan indikator yaitu perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan dan pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, pemindahtanganan, penghapusan dan pemusnahan, penatausahaan, serta pembinaan pengawasan dan pengendalian.

Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja pada Tahun 2023 sebesar 107,24 naik 5,14% dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 102 dan tidak dapat dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra 2024 karena tidak ditargetkan dalam Renstra 2020-2024.

Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja

1. Komitmen pengelolaan BMN yang tertib dan berakuntabilitas oleh seluruh pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur.
2. Komunikasi yang baik dengan mitra utama BPKP yaitu KPKNL Samarinda.
3. Proses pelaksanaan inventarisasi BMN secara sensus yang terkoordinasi dengan baik.
4. Pengelolaan BMN yang telah sesuai dengan peraturan-peraturan Menteri Keuangan yang berlaku.

Namun kondisi tersebut lebih dapat dimaksimalkan bila formasi pegawai pengelola BMN dan persediaan terpenuhi.

Rencana Tindak

Dalam rangka peningkatan capaian pengelolaan BMN kami akan melakukan usulan penambahan SDM untuk pengelola BMN dan persediaan dan/atau mengusulkan SDM yang ada sebagai pengelola BMN dan persediaan.



Risiko inherent sesuai aplikasi RMIS yang terdapat pada sastra 6 “Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja” antara lain sebagai berikut:

1. Terdapat kegiatan yang belum/kurang dianggarkan dalam DIPA/RKAKL
2. Penyusunan perjanjian kinerja tidak tepat waktu
3. Penyusunan laporan kinerja tidak tepat waktu
4. Pembiayaan penugasan beban mitra tidak akuntabel
5. Kesalahan pembebanan anggaran pada kegiatan lain
6. Lambatnya pelaksanaan revisi anggaran
7. Pemindahan aset tanpa persetujuan
8. Pengumpulan bukti pemenuhan unsur maturitas SPIP tidak optimal
9. perbedaan data BMN jika dibandingkan kondisi sebenarnya (riil)
10. Pengajuan Zi menuju WBK/WBBM tidak disetujui oleh Tim Penilai Internal
11. Realisasi pembangunan fisik infrastruktur tidak sesuai dengan kontrak/peraturan yang berlaku
12. Belum seluruh risiko teridentifikasi secara lengkap

Atas Risiko tersebut pengendalian yang ada sudah memadai sehingga tidak terdapat risiko residual.

C. Akuntabilitas Keuangan

Realisasi anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 sebesar Rp25.975.242.675,00 atau terserap 99,59% dibandingkan dengan anggaran tahun 2023 sebesar Rp26.119.162.000,00. Rincian realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini.

Tabel 3.16
Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun 2023 Menurut Jenis Belanja

No.	Jenis Belanja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Belanja Pegawai	16.544.832.000	16.412.985.260	99,20
2	Belanja Barang	8.954.001.000	8.942.230.435	99,87
3	Belanja Modal	620.329.000	620.026.980	99,94
Jumlah		26.119.162.000	25.975.242.675	99,45

Tabel 3.17
Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun 2023 Menurut Program/Kegiatan

No	Program/ Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
I Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP				
1	Kegiatan Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	19.798.612.000	19.664.835.731	99,32
2	Kegiatan Layanan Dukungan Manajemen	789.659.000	789.378.805	99,96
3	Kegiatan Layanan Sarana dan Prasarana	620.329.000	620.026.980	99,95
Jumlah Program		21.208.600.000	21.074.241.516	99,37
II Program Pengawasan Pembangunan				
1	Kegiatan Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara, Daerah dan Desa Bidang Perekonomian dan Kemaritiman	112.252.400	112.240.425	99,99



No	Program/ Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
2	Kegiatan Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara, Daerah dan Desa Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah	224.504.800	224.480.850	99,99
3	Kegiatan Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara, Daerah dan Desa Bidang Investigasi	112.252.400	112.240.425	99,99
4	Kegiatan Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengendalian Kecurangan Bidang Investigasi	127.903.000	127.693.038	99,84
5	Kegiatan Rekomendasi Hasil Pengawasan Strategis Nasional/Daerah Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah	264.920.469	264.183.249	99,72
6	Kegiatan Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Infrastruktur dan Konektivitas Bidang Perekonomian dan Kemaritiman	555.377.000	554.792.185	99,89
7	Kegiatan Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Ketahanan Pangan Bidang Investigasi	171.393.000	171.359.578	99,98
8	Kegiatan Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Daerah Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah	192.390.000	191.775.926	99,68
9	Kegiatan Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Tindak Lanjut	150.000.000	149.410.480	99,61
10	Kegiatan Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Sumber Daya Manusia Bidang Akuntan Negara	323.099.000	322.623.377	99,85
11	Kegiatan Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan dan BLU/BLUD Bidang Akuntan Negara	104.865.000	104.115.500	99,29
12	Kegiatan Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Pengendalian Kecurangan Bidang Investigasi	127.903.000	127.693.038	99,84
13	Kegiatan Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Ekonomi Bidang Polhukam PMK	224.081.000	223.458.469	99,72
14	Kegiatan Rekomendasi Hasil Pengawasan MR atas Kualitas Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah	834.836.000	832.977.077	99,78
15	Kegiatan Rekomendasi Hasil Pengawasan MR atas Kualitas Pengendalian Intern Badan Usaha Bidang Akuntan Negara	326.388.000	326.205.513	99,94
16	Kegiatan Rekomendasi Hasil Pengawasan Strategis Nasional/Daerah Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah	946.144.531	943.511.604	99,72
17	Kegiatan Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Negara, Daerah dan Desa Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah	112.252.400	112.240.425	99,99
	Jumlah Program	4.910.562.000	4.901.001.159	99,81
	Jumlah Total	26.119.162.000	25.975.242.675	99,45



Tabel 3.18

Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun 2023 Menurut Sasaran Program/Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah	841.833.069	840.837.987,64	99,88
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional	1.069.160.000	1.067.338.169	99,83
3	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha	427.964.000	426.738.877	99,71
4	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	351.984.000	351.151.506,50	99,76
5	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	2.219.620.931	2.214.934.618,86	99,79
6	Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja	21.208.600.000	21.074.241.516	99,37
Jumlah		26.119.162.000	25.975.242.675	99,45

D. Analisis Efisiensi

Tabel 3.19

Analisis Efisiensi Anggaran dan SDM

No	Sasaran Kegiatan	Capaian Output		Capaian Output	Efisiensi	
		Dana	SDM		Dana	SDM
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah	99,88%	92,44%	1807,64%	1810%	1955%
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional	99,83%	90,82%	282,19%	283%	311%
3	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha	99,71%	89,08%	143,42%	144%	161%
4	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	99,76%	89,08%	96,08%	96%	108%
5	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	99,79%	92,58%	114,48%	115%	124%
6	Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja	99,37%	N/A	117,18%	N/A	N/A

Seluruh kegiatan operasional Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur didukung oleh penggunaan input berupa dana dan SDM. Efisiensi dapat diartikan sebagai bentuk produktivitas yang diukur dengan membandingkan output yang dihasilkan dengan input (dana dan SDM) yang digunakan. Analisis efisiensi dilakukan per sasaran kegiatan. Penyimpulan efisiensi adalah sebagai berikut:

1. Efisien jika rasio efisiensi sama atau lebih besar dari 100%.
2. Belum efisien jika rasio efisiensi lebih kecil dari 100%.

Rincian analisis efisiensi masing-masing sasaran kegiatan terdapat pada Lampiran III dengan uraian sebagai berikut:



Sasaran Kegiatan 1: “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/ Daerah”

Realisasi penggunaan anggaran pada sasaran kegiatan Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah sebesar Rp840.837.987,64 dari target sebesar Rp841.833.069,00 atau mencapai 99,88% Sementara itu realisasi penggunaan SDM (OH) sebesar 2.618 dari target sebesar 2.832 atau mencapai 92,44%.

Rata-rata capaian output untuk sasaran kegiatan Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah telah mencapai 1807,64% lebih tinggi dari capaian anggaran 99,88% maupun capaian SDM 92,44%, sehingga dapat disimpulkan bahwa **penggunaan anggaran dan SDM telah efisien.**

Sasaran Kegiatan 2: “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional”

Realisasi penggunaan anggaran pada sasaran kegiatan Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional sebesar Rp1.067.338.169,00 dari target sebesar Rp1.069.160.000,00 atau mencapai 99,83%. Sementara itu realisasi penggunaan SDM (OH) sebesar 1.821 dari target sebesar 2.005 atau mencapai 90,82%.

Rata-rata capaian output untuk sasaran kegiatan Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Pembangunan Nasional telah mencapai 282,19% lebih tinggi dari capaian anggaran 99,83% maupun capaian SDM (OH) 90,82%, sehingga dapat disimpulkan bahwa **penggunaan anggaran dan SDM telah efisien.**

Sasaran Kegiatan 3: “Meningkatnya pengawasan pembangunan atas badan usaha”

Realisasi penggunaan anggaran pada sasaran kegiatan Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha sebesar Rp426.738.877,00 dari target sebesar Rp427.964.000,00 atau mencapai 99,71%. Sementara itu realisasi penggunaan SDM (OH) sebesar 1.085 dari target sebesar 1.218 atau mencapai 89,08%.

Rata-rata capaian output untuk sasaran kegiatan Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha telah mencapai 143,42%, lebih tinggi dari capaian anggaran 99,71% maupun capaian SDM (OH) 89,08%, sehingga dapat disimpulkan bahwa **penggunaan anggaran dan SDM telah efisien.**

Sasaran Kegiatan 4 : “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi”

Realisasi penggunaan anggaran pada sasaran kegiatan Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi sebesar Rp351.151.506,50 dari target sebesar Rp351.984.000,00 atau mencapai 99,76%. Sementara itu realisasi penggunaan SDM (OH) sebesar 1.085 dari target sebesar 1.218 atau mencapai 89,08%.

Rata-rata capaian output untuk sasaran kegiatan Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi telah mencapai 96,08%, lebih rendah dari capaian anggaran 99,76% dan lebih tinggi dari capaian SDM (OH) 89,08%, sehingga dapat disimpulkan bahwa **penggunaan anggaran efisien dan penggunaan SDM sudah efisien.**

Sasaran kegiatan 5 : “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU”

Realisasi penggunaan anggaran pada sasaran kegiatan Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU sebesar Rp2.214.934.618,86 dari target sebesar



Rp2.219.620.931,00 atau mencapai 99,79%. Sementara itu realisasi penggunaan SDM (OH) sebesar 3.195 dari target sebesar 3.451 atau mencapai 92,58%.

Rata-rata capaian output untuk sasaran kegiatan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU telah mencapai 114,48%, lebih tinggi dari capaian anggaran 99,79% dan lebih tinggi dari capaian SDM (OH) 92,58%, sehingga dapat disimpulkan bahwa **penggunaan anggaran dan SDM telah efisien.**

Satu sasaran kegiatan yaitu "Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Unit Kerja" merupakan kegiatan dukungan kinerja (PKAU) dan tidak dapat diukur efisiensinya.

E. Kinerja Lainnya

1. Penghargaan

Pada Tahun 2023, penghargaan yang telah diperoleh oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur diantaranya:



1. Peringkat I Unit Kearsipan II dengan kategori AA "Sangat Memuaskan" berdasarkan hasil pengawasan kearsipan tahun 2022 oleh Sekretaris Utama
2. Peringkat III Satuan Kerja dengan Tingkat Kesesuaian BMN dengan SBSK Paling Optimal dengan Jumlah Target Aset Terbanyak TA 2022 oleh KPKNL Samarinda
3. Peringkat III Satuan Kerja Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Teraktif TA 2022 Provinsi Kalimantan Timur oleh DJPB Provinsi Kalimantan Timur
4. 3rd Most Valuable Financial Award 2022 oleh Biro Keuangan BPKP
5. Unit Pembelajaran Teraktif Ketiga Tahun 2023 oleh Kepala BPKP



6. Penghargaan Gubernur Kalimantan Timur atas Sumbangsih dalam Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Tahun 2023
7. IKPA terbaik kategori SATKER DIPA PAGU sedang Semester I Tahun Anggaran 2023
8. Capaian Output Terbaik kategori SATKER DIPA PAGU sedang Semester I Tahun Anggaran 2023
9. Peringkat III Satker dengan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Provinsi Kalimantan Timur TA 2023 Kategori Pagu Sedang
10. Pengelolaan UP dan TUP Terbaik kategori SATKER DIPA PAGU sedang Semester I Tahun Anggaran 2023
11. Peringkat II Transaksi Digipay Terbesar Semester I Tahun Anggaran 2023
12. Transformasi Digital Terbaik per Triwulan III Tahun 2023 Peringkat II oleh Kepala Biro Keuangan BPKP
13. IKPA Terbaik per Triwulan III Tahun 2023 Peringkat II oleh Kepala Biro Keuangan BPKP

2. Kinerja lainnya (di luar perkin)

Beberapa kinerja lain diluar yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja, antara lain:



Pengawasan Tematik

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan kegiatan pengawasan yang telah ditetapkan dalam Agenda Prioritas Pengawasan Daerah Tahun 2022 untuk mengawal akuntabilitas pembangunan daerah yang difokuskan pada isu-isu strategis pembangunan dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Pangan yang Handal di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 melalui kegiatan pengawasan yaitu pada Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Program Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan Sawit. Melalui pengawasan yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam memberikan kontribusi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Timur

Pengawasan IKN

Pada tahun 2023, BPKP telah memberikan *Assurance* dan Konsultasi kepada *stakeholder* terkait demi kelancaran pembangunan Ibu Kota Negara di Provinsi Kalimantan Timur, adapun pengawasan-pengawasan yang telah dilakukan yaitu:

1. Evaluasi Atribusi Pendanaan Pemerintah Daerah atas Pembangunan Kawasan Ibu Kota Negara (IKN)





2. Evaluasi Dukungan Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol Ibu Kota Negara Provinsi Kalimantan Timur
3. Monitoring Pendanaan Pemerintah Daerah atas Pembangunan Kawasan IKN
4. Monitoring Pembangunan Infrastruktur di Kawasan Ibu Kota Negara (IKN)
5. Reviu Proyek Strategis Nasional (PSN) Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Badan Otorita Ibu Kota Nusantara
6. Audit atas Pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri KIPP IKN Tahun 2023 pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Kalimantan II
7. Reviu Penambahan Pagu Kontrak Tahun Jamak (MYC) Paket Jalan TOL IKN Segmen Sp.Tempadung – Jembatan Pulau Balang



Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

Evaluasi Mendalam atas Implementasi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023 Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Balikpapan dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka memastikan implementasi kebijakan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem telah optimal untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem di wilayah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2024, melalui keterpaduan dan sinergi program, serta kerja sama antarkementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

Pengawasan atas Pemilu Pilkada 2024

Dalam mendukung tercapainya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang akuntabel, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan pengawasan, diantaranya:

1. Penilaian Risiko Kecurangan atas Perencanaan/Penganggaran serta Pengelolaan Anggaran pada Pemilu dan Pilkada
2. Evaluasi atas Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2023 dan Tahun 2024
3. Pengawasan Akuntabilitas Pengamanan dan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak pada Provinsi Kalimantan Timur
4. Audit Tujuan Tertentu atas Akuntabilitas Pengadaan Logistik dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Persiapan Pemilu Tahun 2024
5. Reviu atas Tata Kelola Kesiapan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024
6. Reviu Atas Proses Penetapan Besaran Biaya Satuan/ Indeks Harga Satuan Pengelolaan Dan Distribusi Logistik Pemilu Tahun 2024 Pada Provinsi Kalimantan Timur



Percepatan Penurunan Stunting

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur melakukan Evaluasi atas Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Desa Tahun 2023 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Samarinda yang bertujuan untuk menilai ketepatan desain serta progres implementasi kebijakan dan strategi percepatan penurunan stunting untuk mendukung target pemerintah yang dituangkan pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.



Pembangunan Rusun ASN BPKP

Pada tahun 2022 Kementerian PUPR melalui Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Timur mulai melakukan Pembangunan 1 Tower Rumah Susun untuk Hunian ASN Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 60 unit 4 lantai. Rumah susun tersebut berlokasi di kompleks perumahan BPKP Jalan Juanda 2 yang awalnya berdiri 10 rumah dinas yang telah disetujui untuk dihapuskan.

Nilai kontrak pembangunan rumah susun yang berada di Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp26.023.597.249,51 (Pembangunan rusun, penyediaan meubelair, dan penyediaan PSU)

Progres pekerjaan fisik pembangunan rumah susun 100% dan telah dilakukan PHO (dengan checklist) tanggal 10 Oktober 2023 sedangkan untuk Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) (pagar keliling, pos jaga, *landscape*, parkir kendaraan, *gate* dan *entrance*, lapangan serbaguna) 82,09% per 15 Desember 2023. Saat ini sedang melakukan Reviu Kelayakan Huni Rumah Susun Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur.

